



**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN
KOMISARIS, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, *CROSS-
DIRECTORSHIP*, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN
*ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)***

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Mariska Nanda Savira
NIM 7211411084**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 Agustus 2016

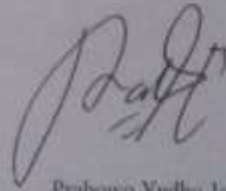
Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Jacharrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

Pembimbing



Prabowo Yudho Jayanto, SE., M.SA
NIP. 198205072008121005

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1 September 2015

Penguji I

Drs. Asrori, M.S

NIP.196005051986011001

Penguji II

Agung Yulianto, S.Pd, M.Si

NIP.197407072003121002

Penguji III

Prabowo Yudo Jayanto, SE, MSA

NIP. 198205072008121005

Mengetahui,

Debita Kuslitas Ekonomi



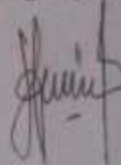
Dr. Wahyuni, M. M

NIP.195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat pada skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2015



Mariska Nanda Savira
NIM 7211411084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“...Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah kamu berharap...”(QS. Al Insyiroh:6-8)

“Man Jadda Wa Jadda” (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

“Man Shobaro Zafiro” (Siapa yang bersabar akan beruntung)

Persembahan

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi dalam menapaki setiap langkah kehidupan.
- ❖ Adikku tersayang yang selalu memberikan doa dan semangat.
- ❖ Mekar, Hesti, Arga, dan Asti yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi.
- ❖ Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mendapat bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship*, *Managerial Ownership*, dan *Institutional Ownership* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan studi.
2. Dr. Wahyono, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dorongan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si, selaku Ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan pelayanan khususnya dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini.

4. Amir Mahmud, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Wali Akuntansi B 2011 Universitas Negeri Semarang.
5. Prabowo Yudo Jayanto SE., MSA., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan memberikan sambungan pemikiran selama penulisan hingga selesai skripsi ini.
6. Drs. Asrori, MS. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan evaluasi dan saran yang bermanfaat.
7. Agung Yulianto , S.Pd, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan evaluasi dan saran yang bermanfaat.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan demikian dapat peneliti sampaikan, semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat berkah yang berlimpah dari Allah SWT.

Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2015

Penulis

SARI

Savira, Mariska Nanda. 2015. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship*, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prabowo Yudo Jayanto SE., MSA

Kata Kunci: Bank Syariah, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Islamic Social Reporting*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia telah mengalami peningkatan termasuk perbankan syariah. Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial yang digunakan oleh perbankan syariah masih menggunakan *Global Reporting Index* (GRI) sebagai acuannya padahal saat ini banyak isu penggunaan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2010-2013. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 8 bank umum syariah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan dengan metode *content analysis*. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship* dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Indonesia, sedangkan ukuran Dewan Komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di Indonesia.

Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu pemerintah disarankan mengeluarkan peraturan/undang-undang khusus yang berkaitan dengan praktik dan pengungkapan ISR, bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel eksogen lain yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dan menambah tahun pengamatan agar lebih menggambarkan pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

ABSTRACT

Savira, Mariska Nanda. 2015. " The Influence of Company Size, Board of Commissioner Size, Sharia Supervisory Board Size, Cross-directorship, Managerial Ownership, and Institutional Ownership on Islamic Social Reporting (ISR). Final Project. Accounting Department, Faculty of Economics, Semarang State University. Advisor: Prabowo Yudo Jayanto SE., MSA.

Keywords: Islamic Banks, Company Size, Board of Commissioners Size, Sharia Supervisory Board size, Cross-directorship, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Islamic Social Reporting.

Disclosure of social responsibility in Indonesia has increased including islamic banks. The size disclosure of social responsibility which used by islamic bank is still using the Global Reporting Index (GRI) as a reference besides nowadays many issues of the use of Islamic Social Reporting (ISR) in accordance with Islamic principles. This study aims to determine the effect of Company Size, Board of Commissioners Size, Sharia Supervisory Board Size, Cross-directorship, Managerial Ownership and Institutional Ownership of the Islamic Social Reporting (ISR) on Sharia Banking in Indonesia.

Population of this study were all Islamic banks in Indonesia in the period of 2010-2013. The number of samples which were tested by 8 Islamic banks were selected using purposive sampling method. This study analyzed the annual reports of companies using content analysis method. Methods which were used in analyzing this study were descriptive analysis and statistical analysis.

The result showed that company size, sharia supervisory board size, cross-directorship, and managerial ownership affected the Islamic social reporting disclosure in Indonesia, while board of commissioner's size and institutional ownership does not affect the Islamic social reporting disclosure in Indonesia.

Suggestions relating to the results of this research is that the government should suggest to create specific regulations / laws related to practices and disclosure of ISR, recommendation for the next researcher is to add other exogenous variables that are supposed to influence the disclosure of ISR and also to add years of observation in order to describe more about the disclosure of ISR at the Bank Sharia in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	18
2.1.2 Teori Legitimasi	23

2.1.3	<i>Teori Stakeholder</i>	25
2.1.4	<i>Shariah Enterprise Theory</i>	28
2.2	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	30
2.2.1	Pengertian dan Konsep CSR	30
2.2.2	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	34
2.3	Ukuran Perusahaan	41
2.4	Dewan Komisaris	42
2.5	Dewan Pengawas Syariah	46
2.6	<i>Cross-directorship</i>	50
2.7	Kepemilikan Manajerial	51
2.8	Kepemilikan Institusional	54
2.9	Penelitian Terdahulu	57
2.10	Kerangka Pemikiran Teoretis dan Pengembangan Hipotesis	61
2.10.1	Kerangka Pemikiran Teoretis	61
2.10.2	Pengembangan Hipotesis	69
BAB III	METODE PENELITIAN	70
3.1	Jenis dan Desain Penelitian	70
3.2	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	71
3.3	Variabel Penelitian	73
3.3.1	Variabel Endogen	73
3.3.2	Variabel Eksogen	74
3.4	Metode Pengumpulan Data	78
3.5	Metode Analisis Data	79

3.5.1 Analisis Deskriptif	79
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif	79
3.5.3 Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS).....	80
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	85
4.1 Analisis Deskriptif	85
4.1.1 Pengungkapan ISR.....	85
4.2.2 Ukuran Perusahaan	88
4.2.3 Ukuran Dewan Komisaris	90
4.2.4 Ukuran Dewan Pengawas Syariah.....	92
4.2.5 <i>Cross-directorship</i>	94
4.2.6 Kepemilikan Manajerial	96
4.2.7 Kepemilikan Institusional.....	98
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	100
4.3 Analisis Data dengan <i>Partial Least Square</i> (PLS).....	103
4.3.1 Uji <i>Outer Model</i>	103
4.3.2 Uji <i>Inner Model</i>	106
4.4 Pembahasan.....	109
4.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ISR	110
4.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ISR	111
4.4.3 Pengaruh Ukuran DPS terhadap ISR.....	112
4.4.4 Pengaruh <i>Cross-directorship</i> terhadap ISR	113
4.4.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ISR	114
4.4.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ISR.....	115

BAB V PENUTUP	116
5.1 Simpulan	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skor Indeks GRI.....	7
Tabel 1.2 Perbandingan Skor Indeks GRI dengan Skor Indeks ISR.....	8
Tabel 1.3 Pengungkapan pada BUS di Indonesia Tahun 2010-2011	9
Tabel 2.1 Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan.....	38
Tabel 2.2 Indeks ISR Tema Produk dan Jasa	38
Tabel 2.3 Indeks ISR Tema Tenaga Kerja	39
Tabel 2.4 Indeks ISR Tema Sosial	39
Tabel 2.5 Indeks ISR Tema Lingkungan.....	40
Tabel 2.6 Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi	40
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu	57
Tabel 3.1 Bank Umum Syariah yang Terdapat di Indonesia.....	71
Tabel 3.2 Perolehan Sampel Penelitian	72
Tabel 3.3 Sampel Penelitian	73
Tabel 3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel	77
Tabel 4.1 Nilai <i>Content Analysis</i> BUS di Indonesia Berdasarkan Tema	85
Tabel 4.2 Nilai ISR pada Bank Umum Syariah di Syariah	86
Tabel 4.3 Ukuran Perusahaan BUS di Indonesia	89
Tabel 4.4 Ukuran Dewan Komisaris BUS di Indonesia.....	91
Tabel 4.5 Ukuran Dewan Pengawas Syariah BUS di Indonesia	93
Tabel 4.6 <i>Cross-directorship</i> BUS di Indonesia	95
Tabel 4.7 Kepemilikan Manajerial BUS di Indonesia	97
Tabel 4.8 Kepemilikan Institusional BUS di Indonesia	99

Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif	100
Tabel 4.10 <i>Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)</i>	105
Tabel 4.11 <i>Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)</i>	106
Tabel 4.12 Nilai R-Square	108
Tabel 4.13 Hasil Keputusan Hipotesis	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Teoretis	66
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Outer Model	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	125
Lampiran 2 Definisi Item Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	127
Lampiran 3 Daftar Populasi, Proses Perolehan Sampel, dan Daftar Sampel	131
Lampiran 4 Nilai <i>Content Analysis</i> BUS di Indonesia Berdasarkan Tema ISR .	132
Lampiran 5 Nilai <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada BUS di Indonesia.....	133
Lampiran 6 Daftar Nilai Ukuran Perusahaan	134
Lampiran 7 Daftar Nilai Ukuran Dewan Komisaris	135
Lampiran 8 Daftar Nilai Ukuran Dewan Pengawas Syariah.....	136
Lampiran 9 Daftar Nilai <i>Cross-directorship</i>	137
Lampiran 10 Daftar Nilai Kepemilikan Manajerial	138
Lampiran 11 Daftar Nilai Kepemilikan Institusional.....	139
Lampiran 12 Rangkuman Nilai Variabel Penelitian	140
Lampiran 13 Tabel yang digunakan dalam analisis Hasil Penelitian.....	141
Lampiran 14 Nilai Indeks ISR	143
Lampiran 15 Rujukan Halaman <i>Checklist</i> Indeks ISR Tahun 2010	147
Lampiran 16 Rujukan Halaman <i>Checklist</i> Indeks ISR Tahun 2011	149
Lampiran 17 Rujukan Halaman <i>Checklist</i> Indeks ISR Tahun 2012	151
Lampiran 18 Rujukan Halaman <i>Checklist</i> Indeks ISR Tahun 2013	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perusahaan mulai dihadapkan dengan konsep *Tripple Bottom Line* (TBL) tidak hanya konsep *Single Bottom Line* (SBL) dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan. *Tripple Bottom Line* (TBL) tersebut meliputi aspek keuangan, kehidupan sosial, dan lingkungan hidup. Konsep *Tripple Bottom Line* (TBL) sangat berbeda dengan konsep *Single Bottom Line* (SBL) karena konsep *Single Bottom Line* (SBL) hanya menekankan pada laba maksimal yang diperoleh perusahaan tanpa memperhatikan aspek lainnya. Aspek lain yang dimaksud tersebut misalnya tanggung jawab sosial yang pada umumnya disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Khoirudin (2013) mengemukakan bahwa secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempat di segala aspeknya. Dilaksanakannya praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mencantulkannya dalam laporan tahunan maka hal tersebut akan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan citra baik dari para investor maupun masyarakat. Adanya citra baik dari investor dan masyarakat maka diharapkan perusahaan

mendapatkan kepercayaan bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya perusahaan juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Secara teoretis, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan inti dari etika bisnis dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham, tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (Azheri, 2011:5). Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain yang berkepentingan diantaranya adalah masyarakat. Tidak hanya masyarakat dan pemegang saham, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan.

Hadi (2011:65) mengemukakan bahwa *social responsibility* dengan perjalanan waktu menjadi tiga bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Khusus dampak negatif memicu reaksi dan protes *stakeholder*, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran *social responsibility* sebagai salah satu strategi legitimasi.

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya baik dari kualitas maupun kuantitas. Pelaporan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) kini menjadi bersifat wajib (*mandatory*). Sedangkan untuk pelaporan sosial syariah, *Islamic Social Reporting* (ISR) tetap bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini menyebabkan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setiap perusahaan atau perbankan syariah tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standar

baku secara syariah tentang pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) syariah.

Pemerintah Indonesia memberikan respon baik terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya memuat tentang tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada pasal 66 ayat (2) dan pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) disebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, tidak hanya laporan keuangan tetapi juga diwajibkan mencantumkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 juga menjelaskan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Selain itu, pelaksanaan fungsi sosial juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial akan mendapatkan manfaat. Salah satunya yaitu akan mendapatkan citra baik dari masyarakat. Hadi (2011:156) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dengan melakukan pengungkapan atas biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan, antara lain menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, transparansi, wujud *social responsibility*, membangun *image* perusahaan, membangun *image* terhadap *mutual fund* dan *stakeholder*, mendukung tingkat kembalian investasi, membangun *image* terhadap investor supaya investasi saham lebih aman. Azheri (2011:6) mengemukakan bahwa bagi

perusahaan yang konsisten menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam aktivitasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholders*-nya (*corporate image*) terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Lestari (2013) menyatakan bahwa meskipun konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai sejarah yang panjang dan bermacam-macam, namun masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia. Sebagai contoh yaitu konflik antara masyarakat di Lampung dengan PT Silva Inhutani (perusahaan milik Negara) karena perusahaan tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Tonasa yang tidak transparan juga menjadi penyebab protes masyarakat.

Selain tuntutan internal perusahaan itu sendiri, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga tidak terlepas dari wujud pertanggungjawaban perusahaan atas dampak lingkungan sebagai akibat aktivitas perusahaannya. Beberapa fakta empiris menunjukkan banyaknya perusahaan pertambangan yang telah merusak tatanan lingkungan dan struktur sosial masyarakat. Seperti kasus lumpur lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Bayat, dan lain sebagainya (Azheri, 2011:6). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua perusahaan di Indonesia melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya berkembang dengan pesat dalam ekonomi konvensional saja, namun juga dalam ekonomi syariah. Khoirudin (2013) menyatakan bahwa ekonomi syariah sudah mempunyai konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Seperti yang dikemukakan Widiawati (2012) bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami.

Perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit saja, seharusnya juga memiliki orientasi untuk membantu kesejahteraan masyarakat juga. Oleh karena itu, seharusnya perbankan syariah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Statistik perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Maret 2015 menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin tersebar di seluruh Indonesia dengan 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor 2.138 unit, dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS). Total aset perbankan syariah di Indonesia telah mencapai Rp198.553 miliar.

Haniffa (Maulida dkk., 2014) menyatakan pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam indeks GRI meliputi Profil dan Strategi Organisasi, Lingkup Ekonomi, Lingkup Lingkungan dan Lingkup Sosial. Pengukuran tersebut dianggap kurang tepat karena

perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan informasi dan membuktikan bahwa perusahaan syariah tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan Islam. Digunakannya *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) tentu belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam, seperti belum terbebasnya dari unsur *riba*, *gharar*, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam (Maulida dkk., 2014). Hal ini tentu saja berbeda dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang merupakan pengembangan tanggung jawab sosial yang telah menggunakan prinsip syariah di dalamnya.

Peneliti ekonomi syariah saat ini banyak menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) sebagai pengukur *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan syariah. *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) berisi standar syariat Islam lembaga keuangan dan industri yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan perspektif Islam. Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia sudah cukup baik namun belum optimal yakni rata-rata 50% dari indeks ISR telah diungkapkan (Khoirudin dalam Fauziah, 2013). Sementara itu, Farook *et. al* (2011) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan antara lain *political right*

and civil liberties, proportion of muslim population, 11 Islamic governance score dan *Investment Account Holders* (IAH).

Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* di Indonesia sudah cukup banyak yang dilakukan pada sektor perbankan syariah. Penelitian Fitria dan Hartanti (2010) mencoba membandingkan skor indeks GRI antara bank syariah dan bank konvensional. Tabel 1.1 berikut menunjukkan skor indeks GRI antara bank syariah dan bank konvensional.

Tabel 1.1
Skor Indeks GRI

Nama	Bank Syariah			Bank Konvensional		
	A	B	C	X	Y	Z
Skor GRI Index	52 (36%)	66 (46%)	58 (40%)	61 (42%)	73 (51%)	61 (42%)

Sumber: Fitria dan Hartanti (2010)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa skor indeks GRI tertinggi dimiliki oleh Bank Konvensional Y sebesar 73 (51%). Sedangkan skor terendah dimiliki oleh Bank Syariah A sebesar 52 (36%). Nilai untuk Bank Syariah B, Bank Syariah C, Bank Konvensional X, dan Bank Konvensional Z secara berturut-turut sebesar 66 (46%), 58 (40%), 61 (42%), dan 61 (42%). Jika dilihat dari nilai maksimum dan minimum tersebut, maka hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa bank konvensional lebih baik daripada bank syariah.

Penelitian Fitria dan Hartanti (2010) tidak hanya membandingkan antara indeks GRI bank syariah dengan indeks GRI bank konvensional tetapi juga membandingkan antara skor indeks GRI dengan skor indeks ISR. Tabel 1.2 berikut menunjukkan skor indeks GRI dengan skor indeks ISR.

Tabel 1.2
Perbandingan Skor Indeks GRI dengan Skor Indeks ISR

Nama	Bank Syariah		
	A	B	C
Skor GRI Index	52 (36%)	66 (46%)	58 (40%)
Skor ISR index	25 (42%)	34 (58%)	27 (46%)

Sumber: Fitria dan Hartanti (2010)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa skor indeks GRI tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah B sebesar 66 (46%). Sedangkan untuk Bank Syariah A dan Bank Syariah C secara berturut-turut sebesar 52 (36%) dan 58 (40%). Skor indeks ISR tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah B sebesar 34 (58%). Nilai skor indeks ISR Bank Syariah A dan Bank Syariah C secara berturut-turut sebesar 25 (42%) dan 27 (46%). Hal ini menunjukkan apabila suatu bank memiliki skor indeks GRI tertinggi maka bank tersebut juga akan memiliki skor indeks ISR tertinggi juga. Sehingga secara umum hasil perbandingan ini menunjukkan kedudukan yang sama antara pengungkapan yang menggunakan indeks GRI dengan pengungkapan yang menggunakan indeks ISR.

Rendahnya skor indeks ISR dibandingkan skor indeks GRI ini diduga karena konsep ISR di Indonesia belum berkembang dan populer. Hal ini dapat dilihat pada hasil *checklist* ISR yang dilakukan oleh Khoirudin (2013). Tabel 1.3 berikut menunjukkan hasil nilai indeks ISR pada bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 1.3
 Pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia
 Tahun 2010-2011

No	Nama Bank	Hasil Checklist		Rasio ISR	
		2010	2011	2010	2011
1	Bank Muamalat Indonesia	34	35	0.7083	0.7292
2	Bank Syariah Mandiri	38	41	0.7917	0.8542
3	Bank Mega Syariah	27	28	0.5625	0.5833
4	BNI Syariah	29	32	0.6042	0.6667
5	BCA Syariah	25	26	0.5208	0.5417
6	BRI Syariah	24	26	0.5000	0.5417
7	Bank Bukopin Syariah	29	30	0.6042	0.6250
8	Bank Victoria Syariah	22	23	0.4583	0.4792
9	Bank Panin Syariah	16	19	0.3333	0.3958
10	BJB Syariah	12	14	0.2500	0.2917
TOTAL		256	274		
RATA-RATA		25,6	27,4		

Sumber: Khoirudin, (2013)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa indeks ISR mengalami peningkatan. Bank Syariah Mandiri konsisten memiliki nilai tertinggi selama periode 2010-2011. Tahun 2010 Bank Syariah Mandiri memiliki nilai sebesar 38 poin, sedangkan pada tahun 2011 memiliki nilai sebesar 41 poin. Nilai indeks terendah pada tahun 2010 dan 2011 dimiliki oleh BJB syariah yaitu secara berturut-turut memiliki nilai 12 poin dan 14 poin. Rendahnya nilai ISR yang dimiliki oleh BJB Syariah bukan berarti bank tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, namun ada kemungkinan hal ini disebabkan BJB Syariah telah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik hanya saja tidak diungkapkan dalam laporan tahunan bank tersebut.

Meningkatnya nilai ISR Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut diduga turut dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas orang muslim bahwa segala sesuatu adalah milik Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, manusia

sebagai pihak yang dituntut untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah, maka manusia wajib melaporkan pertanggungjawabannya kepada Allah sebagai pusat segala sesuatu. Pertanggungjawaban tersebut yaitu dalam bentuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai amanah dan wujud kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Bank Umum Syariah yang melaporkan tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah akan menjadi pertimbangan para pengambil keputusan muslim. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam (Haniffa dalam Khoirudin, 2013). Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pemangku kepentingan perusahaan tersebut tetapi juga berguna bagi masyarakat dan wujud memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah.

Beberapa penelitian terdahulu tentang *Islamic Social Reporting* (ISR) di sektor perbankan syariah antara lain Fitria dan Hartanti (2010), Farook *et. al* (2011), Assegaf *et. al* (2012), Ningrum (2013), Khoirudin (2013), Lestari (2013), dan Fauziah (2013). Penelitian Khoirudin (2013) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah ukuran Dewan Komisaris. Sementara itu, Assegaf *et. al* (2012) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* adalah *managerial ownership*. Penelitian Lestari (2013) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ningrum (2013) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah

berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini memperkaya penelitian Khoirudin (2013) dan Assegaf *et. al* (2012) untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini akan mencoba menguji apakah variabel-variabel ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya masih sedikit yang menggunakan variabel *cross-directorship*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional untuk menguji pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

Faktor yang diduga mempengaruhi *Islamic Corporate Reporting* (ISR) antara lain adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar kecilnya suatu perusahaan (Maulida dkk., 2014). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula modal yang ditanamkan sehingga sumber daya dan dana yang besar dalam perusahaan akan menimbulkan permintaan yang lebih luas akan informasi pelaporan perusahaannya. Penelitian Lestari (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal ini berbeda dengan penelitian Maulida dkk.(2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Faktor lain yang diduga juga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan suatu

mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Sembiring (Khoirudin, 2013) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Terkait dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang baik maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat meminimalkan informasi yang dapat disembunyikan atau direayasa oleh manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2013) menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Dewan Pengawas Syariah juga diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dewan Pengawas Syariah merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* (ISR). Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Ningrum (2013) yang melakukan penelitian

mengenai pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Faktor lain yang juga diduga berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah *cross-directorship*. *Cross-directorship* berarti Dewan Komisaris yang memiliki kedudukan pada lebih dari satu perusahaan (Assegaf *et. al.*, 2012). Semakin besar *cross-directorship*, maka semakin besar distribusi informasi yang diperlukan. Sehingga Dewan Komisaris memperoleh informasi dari perusahaan lain yang dapat memberikan nilai tambah termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Ketika Dewan Komisaris hanya memiliki kedudukan pada satu perusahaan, maka tidak akan ada distribusi informasi yang diperlukan. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memperoleh informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi manajemen dan informasi dari perusahaan lain yang dapat memberikan nilai tambah.

Kepemilikan manajerial juga diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik pada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan

kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian Assegaf *et. al* (2012) yang menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Assegaf *et. al* (2012) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan memperkecil adanya konflik atau *agency problem*. Oleh karena itu, manajer akan mamaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan.

Kepemilikan institusional juga diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Anggraini (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi/lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan perusahaan lain). Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas dengan kinerja manajerial, maka sahamnya akan dijual. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin baik monitoring yang dilakukan oleh pihak institusional terhadap manajerial termasuk monitoring terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan fenomena maraknya praktik CSR dalam dunia bisnis termasuk industry perbankan syariah dan pentingnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah serta berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis mencoba meneliti **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Pengawas Syariah, *Cross-directorship*, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
2. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
3. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
4. Apakah *cross-directorship* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
2. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
3. Menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
4. Menganalisis pengaruh *cross-directorship* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
5. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
6. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan materi *Islamic Social Reporting (ISR)* dan menambah

pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan dapat memberikan masukan serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi perusahaan dalam hal pengungkapan laporan tahunan.

3. Bagi Investor

Adanya peningkatan informasi mengenai perusahaan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor pada saat melakukan keputusan investasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara agen dan prinsipal. Agen yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen suatu perusahaan, sedangkan untuk prinsipal adalah pemilik perusahaan. Hubungan keagenan ini terjadi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa. Pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka. Salah satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Teori keagenan mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan. Konflik kepentingan ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingan pihak tersebut terhadap perusahaan.

Pengelola perusahaan yaitu manajer tentu saja memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal sehingga manajer mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan. Perusahaan dianggap sekumpulan kontrak antara prinsipal (pemilik perusahaan) dengan agen yaitu manajer. Pemilik perusahaan tentu akan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer tetapi tentu saja masing-

masing pihak mempunyai kepentingan yang berlawanan. Oleh karena itu, konflik akan muncul ketika agen tidak selalu berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan prinsipal, sehingga menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency costs*).

Menurut Falichin (2011), teori keagenan didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara *principal* atau pemilik dana dan *agent* yaitu pihak yang bertanggungjawab mengelola dana yang dirumuskan dalam sebuah kontrak. Adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan pengelola tersebut memicu timbulnya *agency problem*. Adapun penyebab timbulnya *agency problem* adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Demi terciptanya keberlanjutan usaha (*sustainability development*), prinsipal mengharapkan supaya agen dapat bertanggungjawab atas dampak dari aktifitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, prinsipal mengharapkan adanya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu bukti tanggungjawab tersebut. Bagi perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan rugi karena *cost* yang dikeluarkan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat susah diasosiasikan dengan pendapatan, sedangkan bagi prinsipal *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebuah investasi demi terciptanya keberlangsungan usaha perusahaan di masa yang akan datang.

2. Pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko.

Hal ini berkaitan dengan keputusan pendanaan. Para pemegang saham hanya peduli terhadap resiko sistematis dari perusahaan, karena mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Namun sebaliknya, manajer lebih peduli pada resiko perusahaan secara keseluruhan. Manajer merupakan orang yang *self interest* (mementingkan dirinya sendiri), *bounded rationality* (memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang), dan *risk adverse* (menghindari resiko). Oleh karena itu, manajer tidak mau menanggung resiko akibat biaya yang besar untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tanpa keuntungan yang pasti. Agen dapat memanfaatkan fleksibilitas pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menjadikan kinerja yang buruk seolah-olah menjadi baik sehingga meraih empati dari *principal* karena *agent* telah bertindak sesuai kontrak yang telah disepakati.

Adanya *agency problem* maka prinsipal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat memonitor dan mengontrol perilaku agen. Hal ini dilakukan agar prinsipal menggunakan dana mereka secara efisien dan efektif serta bertindak sesuai harapan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal.

- b. Kontrak insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan referensi dengan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja, semakin banyak insentif yang ada bagi agen untuk memperbaiki ukuran.
- c. Kompensasi Direksi dan manajemen serta rencana kepemilikan saham. Suatu perusahaan yang membayarkan bonus kepada direksi dan manajemennya dalam bentuk opsi saham merupakan suatu biaya agensi yang ada dalam ukuran kompensasi insentif.
- d. Manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi. Hubungan antara manajemen unit bisnis dan harga saham lebih jauh dibandingkan dengan hubungan antara manajerial dan harga saham. Sulit untuk mengisolasi kontribusi yang diberikan oleh unit bisnis individual terhadap peningkatan dalam harga saham perusahaan.

Teori keagenan merupakan teori dasar yang digunakan dalam praktik bisnis perusahaan. Teori ini berhubungan erat dengan tiga faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam penelitian ini. Adapun ketiga faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Pada umumnya, dengan adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen akan menimbulkan konflik atau *agency problem*. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka akan memperkecil adanya *agency problem* tersebut. Manajer akan memaksimalkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang cukup penting untuk meminimalisasi terjadinya *agency problem* antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga tidak mudah percaya dengan hasil keputusan manajer. Selain itu, kepemilikan institusional juga sebagai monitor manajemen. Sama halnya dengan adanya kepemilikan manajer, kepemilikan institusional juga akan mendorong tingkat pengawasan sehingga dapat mengantisipasi perilaku oportunistik atau mementingkan kepentingan pribadi manajer itu sendiri. Teori keagenan juga sering dikaitkan dengan ukuran perusahaan, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

2.1.2 Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong organisasi agar berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan (Widiawati, 2012). Legitimasi masyarakat merupakan salah satu faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah

lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial ataupun ekonomi. Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman dalam Widiawati, 2012). Legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan serius atau skandal keuangan maka upaya organisasi yang dapat dilakukan yaitu mencoba untuk mendidik *stakeholder* tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja, mencoba untuk merubah persepsi *stakeholder* terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi), mengalihkan perhatian dengan mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan, dan mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerja.

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan dapat ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Sebagai contoh, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi

dibandingkan dengan elemen negatif. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif (Pattern dalam Hadi, 2011:92), yaitu dengan cara:

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggung jawab sosial.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa teori legitimasi adalah salah satu teori yang mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial. Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur *good corporate governance* maupun yang tidak termasuk struktur *good corporate governance* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Struktur *good corporate governance* dalam hal ini adalah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan untuk yang tidak termasuk struktur *good corporate governance* adalah ukuran perusahaan.

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di masyarakat. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan untuk masa yang akan datang.

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dalam penelitian ini, teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan faktor Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan *cross-directorship* dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam perbankan syariah. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan *cross-directorship* dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) agar regulasi Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

2.1.3 Teori Stakeholders

Pengungkapan sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Investor perlu mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari dampak yang timbul di kemudian hari sebagai akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders* (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Widiawati, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholders* menjelaskan tentang perusahaan sebagai sebuah entitas yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan perusahaannya saja melainkan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku

kepentingan perusahaan tersebut, seperti: manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, *shareholders*, serta masyarakat sekitar perusahaan. Adapun kategori *stakeholders* menurut Rhenald Kasali (Putri, 2014), yaitu sebagai berikut:

1) *Stakeholders internal* dan *stakeholders eksternal*

Stakeholders internal adalah para pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkungan organisasi (manajer, karyawan, pemegang saham). Sedangkan *stakeholders eksternal* ialah para pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan (supplier, kreditor, investor, konsumen, analis, pemerintah, pers, masyarakat dan sebagainya).

2) *Stakeholders primer*, *stakeholders sekunder*, dan *stakeholders marjinal*

Stakeholders primer ialah *stakeholders* yang paling mampu, selanjutnya *stakeholders* yang kurang mampu adalah *stakeholders sekunder*. Sedangkan *stakeholders marjinal* adalah *stakeholders* yang biasa diabaikan. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3) *Stakeholders tradisional* dan *stakeholders masa depan*

Stakeholders tradisional dapat diartikan *stakeholders* yang sudah berhubungan dengan organisasi saat ini. *Stakeholders tradisional* ini meliputi karyawan dan konsumen. Sedangkan *stakeholders masa depan* merupakan *stakeholders* pada masa depan yang diperkirakan dapat memberikan pengaruhnya bagi organisasi seperti konsumen potensial, peneliti.

- 4) *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted* (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli)

Di antara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu untuk mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

- 5) *Silent majority* dan *vocal minority* (pasif dan aktif)

Aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara *vocal* (aktif) namun ada juga pihak yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Selain kategori *stakeholders* tersebut, *stakeholders* dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik pengorganisasiannya (Azheri, 2011:115), yaitu:

- a. *Stakeholders* publik yang tidak terorganisasi, yaitu *stakeholders* individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain, masyarakat, tokoh masyarakat, pengamat, dan sebagainya.
- b. *Stakeholders* publik yang terorganisasi yaitu *stakeholders* yang terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, dimana pimpinan atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya memberi pandangan dan sikap dalam proses pengambilan dan implementasi suatu keputusan.
- c. *Stakeholders* yang terorganisasi secara semu, yaitu *stakeholders* yang memiliki organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pimpinan dan anggota diberi kebebasan

bersikap dan berpandangan sehingga biasanya anggotanya tidak bisa bertindak atas nama organisasi. Misalnya, beberapa organisasi informal di masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Teori *stakeholders* merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan sosial. Teori *stakeholders* dapat mendeskripsikan faktor *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam penelitian ini. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa operasi perusahaan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak lain seperti *stakeholders* dan masyarakat. Diharapkan melalui teori *stakeholders* ini, pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.

2.1.4 *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang perlu diinternalisasikan dengan nilai Tauhid. Slamet dalam Triyuwono (2006:356) menyatakan bahwa dalam *shariah enterprise theory*, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Triyuwono (2006:357) menyatakan bahwa dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam , atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Pada dasarnya manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam, maka *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet dalam Triyuwono, 2006:357).

Menurut *shariah enterprise theory*, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan ketentuan atau hukum-hukum Allah. *Stakeholders* yang kedua adalah manusia. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*direct stakeholders*) yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lain. Kelompok kedua yaitu pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*indirect stakeholders*), yang terdiri dari: masyarakat *mustahiq*

(penerima zakat, infaq dan shadaqah) dan lingkungan alam. *Stakeholders* yang ketiga adalah alam. Alam merupakan pihak yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan berada di atas bumi, menggunakan energi dari alam, dan mengambil bahan baku juga dari alam. Namun, sebagai *feedback* atas hal tersebut alam tidak menginginkan imbalan materi seperti halnya manusia. Alam hanya ingin mendapatkan wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam.

Penjelasan tersebut berarti bahwa *shariah enterprise theory* menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu. Manusia merupakan pihak yang dituntut untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Hal ini dikarenakan Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Dalam penelitian ini, *Islamic Social Reporting* yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan amanah dan wujud kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum Allah, yang tidak terlepas dari tujuan Islam.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Pengertian dan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Dewasa ini, publik menginginkan adanya transparansi dan akuntansi perusahaan sebagai bentuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu bentuk implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut adalah dengan melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akhir-akhir ini menjadi tren terkait dengan isu lingkungan. Isu lingkungan yang terjadi misalnya eksploitasi sumber daya baik secara besar maupun kecil yang

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sangat penting. Adanya eksploitasi tersebut maka perusahaan harus memikirkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sehingga terjadi keseimbangan.

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), diantaranya *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut:

“Corporate Social Responsibility (CSR) is continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. Berdasarkan definisi tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas setempat serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat (Khoirudin, 2013). Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan kontribusi yang penting bagi pembangunan ekonomi yang tidak hanya memberikan pengaruh kalangan bisnis untuk berperilaku etis. Ragam tanggung jawab perusahaan menurut Post (dalam Hadi, 2011:61) terdiri dari tiga dimensi, yaitu:

1. *Economic responsibility* merupakan keberadaan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholder*, seperti: meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, pembayaran deviden, dan jenis lainnya. Di samping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut *interest* yang dikenakan.
2. *Legal responsibility*, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk ketika perusahaan melakukan kegiatan bisnis, maka kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundangan yang berlaku.
3. *Social responsibility*, merupakan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat. *Social responsibility* menjadi tuntutan ketika kegiatan bisnis perusahaan berhuungan dengan pihak eksternal.

David (dalam Hadi, 2011:59) membagi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu:

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.
2. *Accountability*, adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas

perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.

3. *Transparency*, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal. Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman khususnya informasi, dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Islam juga telah menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ahmad (dalam Fitria dan Hartati 2010) menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan *sunnah*, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan syariah Islam.

Salah satu lembaga bisnis yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah adalah perbankan syariah. Dusuki dan Dar (Khoirudin, 2013) menyatakan bahwa pada perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor yaitu perbankan syariah berlandaskan syariah yang beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggung jawab sosial serta adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Setiap perbankan syariah di Indonesia pasti melaksanakan aktivitas perusahaannya berdasarkan dengan prinsip syariah.

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga *financial intermediary* baik itu bagi individu maupun bagi institusi. Tanggung jawab religius yaitu kewajiban bagi institusi finansial Islam untuk mematuhi kekayaan ekonomi secara efisien dan menguntungkan. Tanggung jawab hukum yaitu kewajiban institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara beroperasinya institusi tersebut. Tanggung jawab etika yaitu menghormati masyarakat, norma agama dan kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum. *Discretionary responsibilities* mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh pemegang saham bahwa institusi finansial Islam akan melaksanakan peran sosialnya dalam mengimplementasikan cita-cita Islam.

2.2.2 Islamic Social Reporting (ISR)

Saat ini, tuntutan publik sangat tinggi agar perusahaan melakukan dan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini terjadi karena, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seperti yang dikemukakan Fitria dan Hartanti (Khoirudin, 2013) bahwa tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia, dimana fenomena ini

dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bisnis.

Kewajiban pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang tanggung jawab sosial sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Untuk pasal 66 ayat (2) disebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, tidak hanya laporan keuangan tetapi juga diwajibkan mencantumkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan pasal 74 menjelaskan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 bagian , pasal 17, dan pasal 34 yang pada intinya mengatur bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Praktik penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur. Namun, seiring dengan adanya tren global akan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR), saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. Praktik *Corporate Social*

Responsibility (CSR) tidak hanya diterapkan dalam perbankan konvensional saja, namun perbankan syariah juga menerapkan praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* ini.

Adanya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat, maka pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* khususnya untuk perbankan syariah. Regulasi tersebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berkembang di Indonesia mengacu pada standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau sekarang dikenal Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia *Sustainability Report Award (ISRA)* kepada

perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

Peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting (ISR)* untuk mengukur *Corporate Social Responsibility (CSR)* institusi keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. *Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti selanjutnya. Secara khusus, indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait dengan lingkungan, hak minoritas dan karyawan (Fitria dan Hartanti, 2010).

Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* diyakini sangat cocok digunakan karena dianggap sesuai dengan perspektif Islam. Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kerja sosial institusi bisnis syariah. Penelitian ini menggunakan indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* yang digunakan oleh Fauziah (2013). Adapun indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* dalam penelitian ini terdiri dari enam tema

yang masing-masing dari tema tersebut terdiri dari beberapa *item*. Tema yang pertama adalah tema investasi dan keuangan. Tema ini berisi mengenai kegiatan keuangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun *item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan

No	<i>Item</i> Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan
1.	Aktivitas riba
2.	Gharar
3.	Zakat
4.	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5.	<i>Current value balance sheet</i>
6.	<i>Value added statements</i>

Sumber: Fauziah (2013) pada lampiran 1

Tema yang kedua dalam indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah tema produk dan jasa. Tema ini berisi tentang produk dan jasa perusahaan dan terdiri dari empat *item*. *Item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Indeks ISR Tema Produk dan Jasa

No	<i>Item</i> Indeks ISR Tema Produk dan Jasa
1.	Status halal atau syariah dalam produk
2.	Pengembangan produk
3.	Peningkatan pelayanan
4.	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku

Sumber: Fauziah (2013) pada lampiran 1

Tema yang ketiga adalah tema tenaga kerja. Tema ini terdiri dari enam *item* yang menjelaskan mengenai perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang dipekerjakan. *Item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Indeks ISR Tema Tenaga Kerja

No	Item Indeks ISR Tema Tenaga Kerja
1.	Karakteristik pekerjaan
2.	Pendidikan dan pelatihan
3.	Kesempatan yang sama
4.	Kesehatan dan keselamatan kerja
5.	Lingkungan kerja
6.	Perekrutan khusus

Sumber: Fauziah (2013) pada lampiran 1

Tema keempat adalah tema sosial. *Item-item* dalam tema ini berisi mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa *item* dalam tema ini sudah sesuai dengan prinsip syariah antara lain yaitu pemberian donasi (*sadaqoh*), wakaf dan pinjaman untuk kebajikan (*Qard Hasan*). *Item* secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Indeks ISR Tema Sosial

No	Item Indeks ISR Tema Sosial
1.	<i>Shadaqoh</i> /donasi
2.	Wakaf
3.	<i>Qardh hasan</i>
4.	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah
5.	Pendidikan
6.	Bantuan kesehatan
7.	Pemberdayaan ekonomi
8.	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
9.	Pembangunan atau renovasi masjid
10.	Kegiatan kepemudaan
11.	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng dan lain-lain)
12.	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain

Sumber: Fauziah (2013) pada lampiran 1

Tema lingkungan merupakan tema kelima indeks ISR dalam penelitian ini. Tema ini terdiri dari tujuh *item* yang berisi mengenai hubungan perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. *Item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Indeks ISR Tema Lingkungan

No	<i>Item</i> Indeks ISR Tema Lingkungan
1.	Kampanye go green
2.	Konservasi lingkungan
3.	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
4.	Polusi
5.	Perbaikan dan pembbuatan sarana umum
6.	Audit lingkungan
7.	Kebijakan manajemen lingkungan

Sumber: Fauziah (2013) pada lampiran 1

Tema indeks ISR yang terakhir adalah tema tata kelola organisasi yang terdiri dari lima belas *item* mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang dilakukan. *Item* tema ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi

No	<i>Item</i> Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi
1.	Profil dan strategi organisasi
2.	Struktur organisasi
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
5.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
6.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
7.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
8.	Penanganan benturan kepentingan
9.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
10.	Penerapan fungsi audit intern
11.	Penerapan fungsi audit ekstern
12.	Batas maksimum penyaluran dana
13.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
14.	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
15.	Etika perusahaan

Sumber: Fauziah (2013) pada lampiran 1

2.3 Ukuran Perusahaan

Secara teoretis, perusahaan dengan jumlah karyawan yang lebih banyak akan menghadapi tekanan politis dari stakeholder. Salah satunya berupa tuntutan dari karyawan atas hak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan operasi perusahaan. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis.

Maulida dkk.(2014) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan yang dimaksud adalah besar atau kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan. Perusahaan besar mengeluarkan biaya produksi yang besar, aktivitas yang lebih padat, dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan proporsi pemegang saham yang besar kemungkinan memiliki kepentingan tersendiri dengan program sosial perusahaan daripada perusahaan sedang ataupun perusahaan kecil, sehingga menyebabkan tekanan politis yang besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya kepada publik.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Namun, dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang kemudian dilogaritma naturalkan (\ln). Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak.

Adanya pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial dalam laporan keuangan, maka secara tidak langsung akan mendapatkan beberapa keuntungan,

yaitu memperoleh citra baik dari masyarakat dan terhindar dari biaya yang cukup besar atas tuntutan masyarakat. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat. Selain itu, untuk perusahaan yang lebih besar akan memperoleh *public demand* yang lebih tinggi terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Alasan lain adalah perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang luas untuk mengurangi biaya tersebut. Lebih banyak pemegang saham, lebih banyak juga pengungkapan karena ada tuntutan dari pemegang saham dan para analis pasar modal.

2.4 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring dalam Khoirudin, 2013). Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah Dewan Komisaris yang ada pada perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan

keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis (KEP-117/M-MBU/2002/ Pasal 16 ayat 1). Wewenang dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pengungkapan *Corporate Social Reporting* (CSR) dengan wewenang tersebut.

Terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu (FCGI dalam Khoirudin, 2013):

1. Sistem Satu Tingkat (*One Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menganut *One Tier System* adalah Amerika Serikat dan Inggris.

2. Sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi

tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang dan Indonesia.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Tugas-tugas utama Dewan Komisaris (www.cic-fcgi.org) meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*);

4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi dan pertanggung jawaban (*responsibility*) atas hal ini;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD Principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Secara umum, Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Dewan Komisaris diperbolehkan memiliki akses pada informasi perusahaan untuk mengatasinya. Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris (KNKG dalam Khoirudin, 2013). Dikarenakan Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam suatu perusahaan maka Dewan Direksi mendapatkan informasi dari Dewan Direksi.

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini hanya

diwajibkan setiap perusahaan memiliki paling sedikit dua anggota Dewan Komisaris, tidak ada ketentuan untuk batas maksimumnya.

2.5 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada pada perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak dua orang. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 pasal 48 menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibuat untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan

telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* terhadap kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu bagian penting dari perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

- (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

- (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selain itu, dalam Surat Keputusan tersebut juga berisi tentang struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dijelaskan dalam Peraturan Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
3. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di atas maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah. Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana *zakat*, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (*qard*) yang dapat

dikategorikan sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR) dan Dewan Pengawas Syariah *Islamic Social Reporting* (ISR) memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

2.6 *Cross-directorship*

Cross-directorship berarti Dewan Komisaris yang memangku kedudukan pada dua atau lebih perusahaan (Assegaf *et. al*, 2012). *Cross-directorship* diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan lain dengan jumlah Dewan Komisaris di perusahaan tersebut. Dewan Komisaris yang memangku jabatan pada lebih dari satu perusahaan ini merupakan fungsi ketergantungan sumber daya (*resources dependence*). Fungsi *resources dependence* memandang dewan sebagai suatu alat untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang penting. Peran ini sangat berguna mengingat sumber daya yang langka justru dapat menciptakan keuntungan yang kompetitif. Hubungan yang bernilai, jarang, dan secara sosial kompleks yang dikembangkan oleh anggota dewan akan sulit ditiru oleh perusahaan lain sehingga dapat menjadi suatu sumber keuangan kompetitif. Anggota dewan yang melakukan *cross-directorship* memiliki pengalaman dan informasi lebih luas yang diharapkan akan berguna bagi perusahaan dibandingkan dengan anggota dewan yang tidak melakukan *cross-directorship*. Terdapat asumsi bahwa *cross-directorship* akan menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Cross-directorship akan membuat informasi menjadi lebih transparan karena digunakan sebagai perbandingan dari pengetahuan organisasi lain (Haniffa dan Coke dalam Assegaf *et. al*, 2012). Ketika Dewan Komisaris hanya memiliki kedudukan pada satu perusahaan (*unitary board*), maka tidak akan ada distribusi informasi yang diperlukan. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memperoleh informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi manajemen dan informasi dari perusahaan lain yang dapat memberikan nilai tambah. Akan tetapi, apabila Dewan Komisaris memiliki kedudukan pada lebih dari satu perusahaan, maka akan mudah memperoleh segala informasi dari perusahaan lain yang dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah perusahaan.

2.7 Kepemilikan Manajerial

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai Dewan Komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial. Nurahman dan Sudarno (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Definisi lain menyebutkan kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode

pengamatan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung jumlah lembar saham manajer dibagi dengan jumlah lembar saham beredar.

Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan.

Masalah teknis tidak akan timbul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tidak dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimalkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Tujuan manajer ini dilandasi oleh dua alasan, yaitu :

- (1) Pertumbuhan yang meningkat akan memberikan peluang bagi manajer bawah dan menengah untuk dipromosikan. Selain itu, manajer dapat membuktikan diri sebagai karyawan yang produktif sehingga dapat diperoleh penghargaan lebih dari wewenang untuk menentukan pengeluaran (biaya-biaya).
- (2) Ukuran perusahaan yang semakin besar memberikan keamanan pekerjaan atau mengurangi kemungkinan *lay-off* dan kompensasi yang semakin besar.

Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antar manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Hal tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan. Akan tetapi, apabila tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial yang tinggi, maka manajer mempunyai hak *voting* yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pertahanan, dalam artian, adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Agency problem dapat dikurangi bila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka akan baik kinerja perusahaan. Kepemilikan saham yang besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoretis ketika kepemilikan manajerial rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya oportunistik manajemen akan meningkat. Kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu, manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial dapat mencegah tindakan *opportunistic* manajer.

2.8 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan institusional maupun kepemilikan individual, atau campuran keduanya dengan proporsi tertentu. Anggraini (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional

merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi/lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan perusahaan lain). Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah lembar saham milik institusi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar dalam perusahaan. Proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) atas laporan yang dibuat menurut data di Jakarta *Stock Exchange* serta kepemilikan saham oleh pihak *blockholders* yaitu saham yang dimiliki perseorangan diatas 5% selama tiga tahun berturut-turut tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider*. Para pihak tersebut dapat berpengaruh pada nilai perusahaan terkait dengan peran mereka sebagai *monitoring management* atau bentuk kontrol kepada pihak manajemen. Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

1. Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditegaskan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar.

Perubahan perilaku kepemilikan institusional dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Meningkatnya aktivitas kepemilikan institusional dalam melakukan monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh kepemilikan institusional telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Biaya yang digunakan untuk keluar dari investasi yang mereka lakukan menjadi semakin mahal karena adanya resiko saham akan terjual pada harga diskon. Kondisi ini akan memotivasi kepemilikan institusional untuk lebih serius dalam mengawasi maupun mengoreksi semua perilaku manajer dan memperpanjang jangka waktu investasi.

Mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan menempatkan dewan ahli yang tidak dibiayai perusahaan sehingga posisinya tidak berada di bawah pengawasan manajer sehingga dewan ahli dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk mengontrol semua tindakan manajer. Pengawasan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi manajer dalam menjalankan usaha dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi *agency cost*.

2.9 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti lain. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Dependen	Hasil
1.	Aldheita Purnasanti Maulida, Agung Yulianto dan Asrori (2014)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) perusahaan syariah di

				<p>JII. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR). Sedangkan variable profitabilitas dan variabel kinerja lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).</p>
2.	Amirul Khoirudin (2013)	<i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia.</p>
3.	Yasmin Umar Assegaf, Falikhatun, dan Salamah Wahyuni (2012)	Bank Syariah di Indonesia: <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (<i>Islamic Social Responsibility Disclosure</i>)	<i>Islamic Corporate Social Reporting</i> (ICSR)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh <i>Cross-directorship</i> dan <i>ownership diffusion</i> terhadap ICSR. Selain itu variabel <i>boardsize</i> berpengaruh terhadap ICSR.</p>
4.	Ratna Aditya Ningrum	Pengaruh Kinerja Keuangan,	<i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel</p>

	(2013)	Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR		kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR). Secara parsial, variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR). Sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).
5.	Amalia Nurul Raditya (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)	Tingkat Pengungkapan ISR	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. Namun penerbitan sukuk, jenis industri, dan umur perusahaan bukan faktor penentu yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.
6.	Septi Widiawati (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Perusahaan-Perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011	Pengungkapan ISR	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel (ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan jenis bank) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

7.	Puji Lestari (2013)	<i>Determinants Of Islamic Social Reporting In Syariah Banks: Case Of Indonesia</i>	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> . Sedangkan umur perusahaan dan <i>proportion of independent commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .
8.	Sayd Farook, M. Kabir Hassan, dan Roman Lanis (2014)	<i>Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks</i>	<i>Islamic Bank's CSR Disclosure</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variasi paling baik menjelaskan “ <i>influence of the relevant publics</i> ” dan “ <i>Shariah Supervisory Boards (SSB) corporate governance mechanism</i> ” variabel. Dengan menggunakan alternatif variabel ukuran, hasil regresi menunjukkan “ <i>level of social and political freedom</i> ” dan “ <i>the proportion of investment account deposits to total assets</i> ” juga signifikan terhadap <i>Islamic bank's CSR disclosure</i> .
9.	Zuraeda Ibrahim, Andrew Marshall dan Rashidah Abdul Rahman (2013)	<i>Islamic Social Disclosure (ICSR) of Malaysian Public Listed Companies: Empirical Findings</i>	<i>Islamic Social Disclosure (ICSR)</i>	Secara parsial variabel <i>underlying philosophy and values (UPV)</i> , <i>product and/or services (PS)</i> , <i>zakat (ZKT)</i> , <i>employees (EYS)</i> , <i>environment (NVRM)</i> , dan <i>Community (CTY)</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICSR. Sedangkan variabel <i>shariah supervisory board (SSB)</i> dan <i>Islamic terminology &</i>

				<i>value (ITV)</i> tidak berpengaruh terhadap ICSR. Secara simultan 8 variabel tersebut berpengaruh positif terhadap ICSR.
--	--	--	--	--

Sumber: Berbagai Penelitian yang Diolah, 2015

2.10 Kerangka Pemikiran Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Kerangka Pemikiran Teoretis

Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia telah mengalami peningkatan termasuk perbankan syariah. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela kini menjadi bersifat wajib. Sedangkan untuk pelaporan sosial syariah tetap bersifat sukarela. Hal ini menyebabkan pelaporan tanggung jawab sosial setiap perusahaan tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standar baku secara syariah tentang pelaporan tanggung jawab sosial berbasis syariah.

Penelitian ini lebih mengacu pada penelitian Khoirudin (2013) dimana faktor ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Penambahan empat variabel baru dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, *cross-directorship*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional juga diprediksi memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang diprosikan dengan total aset perusahaan (Maulida dkk.,2014). Total aset perusahaan diperoleh dari laporan keuangan akhir tahun periode dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), dimana jika ukuran perusahaan semakin besar maka informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan perusahaan semakin banyak. Pengungkapan informasi yang semakin banyak maka dapat mengurangi biaya keagenan dalam suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2013) mengenai ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank syariah yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial secara Islam. Assegaf *et. al* (2012) melakukan penelitian mengenai *board size*, *cross-directorship*, *managerial ownership*, dan *ownership diffusion* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Raditya (2012) meneliti penerbitan sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan umur perusahaan terhadap

tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin banyak pula informasi perusahaan yang akan diungkapkan termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. Variabel tersebut diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin besar ukuran Dewan Komisaris maka pengawasan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang baik tersebut, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat meminimalisasi informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan ukuran Dewan Komisaris yang besar maka dapat mendorong manajemen selaku pelaku operasi perusahaan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) agar regulasi Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2010) mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan umur perusahaan terhadap *corporate social responsibility disclosure*

pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Selain itu, Chariri (2012) mengenai pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Reporting (CSR)* pada bank syariah di Asia menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Reporting (CSR)* pada bank syariah di Asia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan sangat penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan informasi kepada *stakeholders*.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah di Indonesia karena perusahaan patuh terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan adanya pengawasan yang semakin efektif maka manajemen dapat melakukan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip syariah serta menjalankan fungsi bank syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian Ningrum (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

4. Pengaruh *Cross-directorship* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Cross-directorship merupakan Dewan Komisaris yang memangku kedudukan pada dua atau lebih perusahaan (Assegaf, 2012). Ketika Dewan Komisaris hanya memiliki kedudukan pada satu perusahaan maka tidak akan ada distribusi informasi yang diperlukan. Semakin besar *cross-directorship* maka semakin besar distribusi informasi yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan semakin transparannya informasi yang diperoleh maka perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang.

Penelitian Hasyim dan Devi dalam Assegaf *et. al* (2012) mengemukakan bahwa proporsi dewan yang memiliki *cross-directorship* berpengaruh signifikan terhadap *earnings quality*. Penelitian di atas menunjukkan bahwa *cross-directorship* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dewan Komisaris yang memiliki kedudukan pada lebih dari satu perusahaan maka akan mudah memperoleh segala informasi dari perusahaan lain yang berguna untuk memberikan nilai tambah perusahaan, dan mengevaluasi manajemen.

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Adanya kepemilikan saham oleh manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil *agency problem*. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana dengan adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen akan menimbulkan konflik atau *agency problem*. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka akan memperkecil adanya *agency problem* tersebut. Manajer akan memaksimalkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Penelitian Assegaf *et. al* (2012) mengenai *corporate governance* dan pengungkapan pertanggung jawaban sosial islami menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Penelitian di atas menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

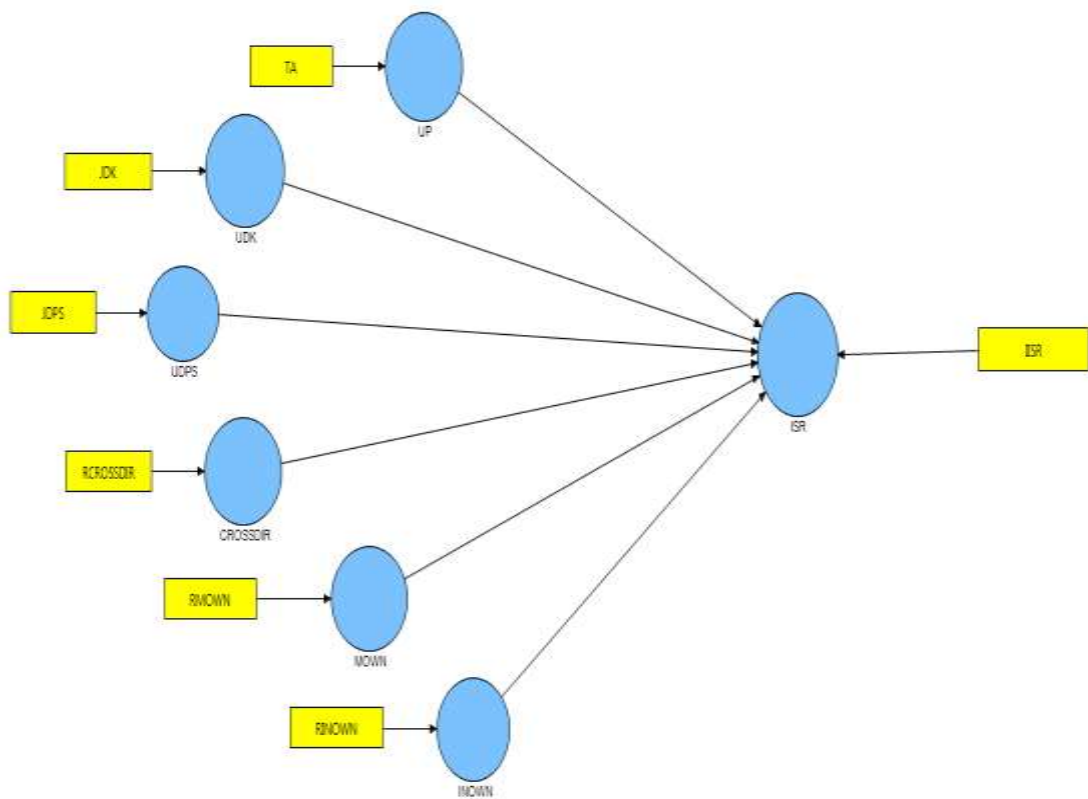
6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka

semakin optimal pengawasan perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, di mana kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang cukup penting untuk meminimalkan terjadinya *agency problem* antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2013) mengenai pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka kerangka pemikiran teoretis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Teoretis

Keterangan

UP adalah ukuran perusahaan

UDK adalah ukuran Dewan Komisaris

UDPS adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah

CROSSDIR adalah *cross-directorship*

MOWN adalah kepemilikan manajerial

INOWN adalah kepemilikan institusional

TA adalah total aset

JDK adalah jumlah Dewan Komisaris

JDPS adalah jumlah Dewan Pengawas Syariah

RCROSSDIR adalah rasio *cross-directorship*

RMOWN adalah rasio kepemilikan manajerial

RINOWN adalah rasio kepemilikan institusional

2.10.2 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dari beberapa kajian teoretis yang telah dikemukakan, berikut disajikan hipotesis.

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

H2: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

H3: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

H4: *Cross-directorship* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana jenis penelitian tersebut dibagi dalam jenis deskriptif dan jenis kuantitatif sehingga dapat menggambarkan pembahasan yang lebih banyak berhubungan dengan rumus yang bersumber dari laporan keuangan. Deskriptif kuantitatif menjelaskan tentang fakta-fakta dari objek yang diteliti dengan menganalisis data angka menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder/sumber sekunder. Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *content analysis* dalam menilai *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan dengan unit analisis laporan tahunan perusahaan. *Content analysis* yaitu metode penelitian observasi yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi dari suatu informasi (Sekaran dalam Rizkiningsih, 2012), yaitu:

1. Laporan tahunan merupakan sumber utama komunikasi perusahaan kepada investor dan banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan laporan sosialnya.

2. Penyajian laporan keuangan dan laporan sosial dalam satu dokumen laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya pengungkapan.
3. Laporan tahunan merupakan salah satu informasi yang banyak dilihat oleh *pressure groups*.
4. Pengungkapan yang dilakukan melalui media-media jurnalistik memiliki risiko kesalahan interpretasi, sedangkan pengungkapan yang dilakukan melalui laporan tahunan dapat dikontrol langsung oleh manajemen.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 12 unit bank. Tabel 3.1 berikut akan menyajikan daftar Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 3.1
Bank Umum Syariah yang Terdapat di Indonesia

No	Kode Bank	Nama Bank
1	BSB	Bank Syariah Bukopin
2	BMS	Bank Mega Syariah
3	BMI	Bank Muamalat Indonesia
4	BSM	Bank Syariah Mandiri
5	BCAS	Bank Central Asia Syariah
6	BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
7	BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
8	PBS	Panin Bank Syariah
9	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah
10	BMSI	Bank Maybank Syariah Indonesia
11	BVS	Bank Victoria Syariah
12	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: Data diolah 2015 pada lampiran 3

Unit analisis yang digunakan adalah laporan tahunan bank umum syariah. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2013. Penentuan sampel yang digunakan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan data yang akan digunakan sesuai kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2010-2013 dan mempublikasikan melalui *website* masing-masing bank.
2. Bank umum syariah yang melaporkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam laporan tahunannya.

Tabel 3.2 berikut merupakan rangkuman hasil perolehan sampel hingga terpilih delapan bank yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

Tabel 3.2
Perolehan Sampel Penelitian

Jumlah bank umum syariah yang terdapat di Indonesia	12
Bank umum syariah yang tidak memenuhi kriteria	(4)
Total Bank	8
Total Unit Analisis (total bank x empat tahun)	32

Sumber: Data diolah 2015 pada lampiran 3

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa bank umum syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian berjumlah 8 bank. Sehingga unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 32 laporan tahunan yang terdiri dari empat periode pengamatan yaitu tahun 2010-2013. Adapun daftar sampel dalam penelitian ini dirinci dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Kode Bank	Nama Bank
1	BSB	Bank Syariah Bukopin
2	BMS	Bank Mega Syariah
3	BMI	Bank Muamalat Indonesia
4	BSM	Bank Syariah Mandiri
5	BCAS	Bank Central Asia Syariah
6	BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
7	BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
8	PBS	Panin Bank Syariah

Sumber: Data diolah pada lampiran 3

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Endogen

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting*. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR atau pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perbankan syariah diukur dengan nilai indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*. Pengukuran indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* dipilih karena perusahaan yang diteliti adalah bank umum syariah, maka dari itu pengukurannya lebih tepat apabila menggunakan indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* yang dianggap sesuai dengan perspektif Islam. Nilai *Islamic Social Reporting (ISR)* diperoleh dari hasil *content analysis*.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan *content analysis* yaitu membuat daftar indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) sesuai dengan Fauziah (2013) yang digunakan terdiri dari 50 item yang dibedakan menjadi enam tema pengungkapan yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola organisasi. Kemudian memberi nilai pada setiap komponen *Islamic Social Reporting* (ISR) secara dikotomi, yaitu 1 apabila komponen tersebut diungkapkan dan 0 apabila tidak diungkapkan. Terakhir, nilai yang diperoleh dari setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total, kemudian dibandingkan dengan jumlah item dalam indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) sehingga angka yang diperoleh merupakan hasil rasio dari indeks *Islamic Social Reporting* (ISR).

3.3.2 Variabel Eksogen

Terdapat enam variabel eksogen penelitian ini. Variabel eksogen tersebut adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan (TA), ukuran Dewan Komisaris yang diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki perusahaan (JDK), ukuran Dewan Pengawas Syariah yang diukur dengan menghitung jumlah Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki oleh perusahaan (JDPS), *cross-directorship* yang diukur dengan menghitung rasio antara jumlah Dewan Komisaris yang memiliki *cross-directorship* dengan jumlah Dewan Komisaris (RCROSSDIR), kepemilikan manajerial yang diukur dengan cara menghitung rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh manajemen dengan jumlah lembar saham yang beredar (RMOWN), dan kepemilikan

institusional yang diukur dengan menghitung rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah lembar saham yang beredar (RINOWN).

a. Ukuran Perusahaan

Maulida dkk.(2014) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan yang dimaksud adalah besar atau kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan pada akhir periode dalam laporan tahunan perusahaan.

b. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring dalam Khoirudin, 2013). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik. Sehingga pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat meminimalkan informasi yang dapat disembunyikan atau direkayasa oleh manajemen. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang ada pada perusahaan tersebut.

c. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah, maka semakin efektif pengawasan

terhadap prinsip syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang sesuai dengan prinsip syariah. Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada pada perusahaan tersebut.

d. *Cross-directorship*

Cross-directorship berarti Dewan Komisaris yang memegang kedudukan pada dua atau lebih perusahaan (Assegaf *et. al*, 2012). Semakin besar *cross-directorship* maka semakin besar distribusi informasi yang diperlukan. Sehingga Dewan Komisaris memperoleh informasi dari perusahaan lain yang dapat memberikan nilai tambah termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Cross-directorship* diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan lain dengan jumlah Dewan Komisaris di perusahaan tersebut.

e. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (Nurrahman dan Sudarno, 2013). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung jumlah lembar saham manajer dibagi dengan jumlah lembar saham beredar.

f. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi/lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pension, dan perusahaan lain) (Anggraini, 2011). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin baik monitoring yang dilakukan oleh pihak institusional terhadap manajer termasuk monitoring terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah lembar saham milik institusi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar dalam perusahaan. Definisi operasional dan skala pengukuran variabel akan disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran Variabel	Skala Pengukuran
1.	Variabel Endogen (Y): <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Perbandingan antara jumlah pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) yang dilakukan dengan jumlah pengungkapan yang diharapkan.	Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) mengacu pada Fauziah (2013).	Rasio
2.	Variabel Eksogen (X): X ₁ ; Ukuran Perusahaan X ₂ ; Ukuran Dewan Komisaris X ₃ ; Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Jumlah aset yang dimiliki perusahaan dalam akhir periode. Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan.	Total aset Jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan. Jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan.	Nominal Nominal Nominal

	X ₄ ; <i>Cross-directorship</i>	Jumlah Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.	Perbandingan jumlah Dewan Komisaris yang merangkap jabatan dengan jumlah Dewan Komisaris di perusahaan tersebut.	Rasio
	X ₅ ; Kepemilikan Manajerial	Presentase kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan.	Perbandingan total lembar saham manajerial dengan total lembar saham yang beredar.	Rasio
	X ₆ ; Kepemilikan Institusional	Presentase kepemilikan saham perusahaan oleh institusi/lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pension atau perusahaan lain.	Perbandingan total lembar saham institusional dengan total lembar saham yang beredar.	Rasio

Sumber: Berbagai penelitian yang diolah, 2015

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang dibutuhkan. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia dari periode 2010-2013 yang dipublikasikan melalui *website* masing-masing bank yang di dalamnya memuat informasi mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* dan informasi yang berkaitan dengan variabel bebas dalam penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk *scoring*.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif suatu data dari masing-masing variabel. Analisis ini dilihat dari nilai indikator variabel tersebut. Misalnya, variabel ISR diukur dari nilai *content analysis* kemudian dilihat kenaikan atau penurunan nilai *content analysis* tersebut yang terjadi dalam sampel. Ukuran perusahaan diukur dari nilai total aset, ukuran Dewan Komisaris diukur dari jumlah Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dari jumlah Dewan Pengawas Syariah, *cross-directorship* diukur dari rasio antara jumlah Dewan Komisaris yang memangku jabatan pada dua atau lebih perusahaan dengan jumlah Dewan Komisaris, kepemilikan manajerial diukur dari rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh manajemen dengan jumlah lembar saham yang beredar, dan kepemilikan institusional yang diukur dari rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusional dengan jumlah lembar saham yang beredar.

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif suatu data yang terdiri dari nilai rata-rata, simpangan baku, maksimum dan minimum. Analisis ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam membaca hasil data penelitian ini. Nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan rata-rata dalam penelitian tersebut, simpangan baku untuk mengetahui variasi yang terdapat dalam penelitian setiap variabelnya, dan maksimum minimum untuk

menggambarkan data terbesar dan terkecil dalam penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menganalisis secara umum kondisi sampel yang diuji yaitu perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2013.

3.5.3 Analisis *Partial Least Square* (PLS)

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah smartPLS 2.0. Analisis data dan pengujian hipotesis ini menggunakan metode *Structural Equation Model-Partial Least Square* (SEM-PLS). Teknik analisis *Structural Equation Model* (SEM) adalah teknik analisis *multivariate* yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antarindikator dengan konstruk ataupun hubungan antar konstruk. Beberapa istilah yang digunakan dalam PLS berbeda dengan pengolahan statistik lainnya seperti SPSS. Istilah tersebut menurut Ghozali dan Latan (2012:8) meliputi:

1. Variabel independen dalam PLS disebut dengan variabel eksogen.
2. Variabel dependen disebut variabel endogen.
3. Variabel laten atau disebut konstruk merupakan variabel yang tidak dapat diamati secara langsung dan memerlukan indikator.
4. Indikator merupakan variabel yang dapat diukur atau bias disebut variabel *manifest* atau *observe*.

5. Model pengukuran sering disebut dengan *outer model* merupakan model pengukuran yang menunjukkan bagaimana variabel *manifest* atau *observe* mempresentasikan variabel laten.
6. Model struktural menunjukkan estimasi antar variabel laten dan konstruk.

Chin dan Gefen (Ghozali dan Latan, 2012) menyatakan bahwa model persamaan struktural (SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariate yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel eksogen dan endogen *multiple* dengan banyak faktor. Model persamaan struktural (SEM) dibagi menjadi dua tipe, yaitu *Covarian-based Struktural Equation Model* (CB-SEM) dan *Partial Least Square - Struktural Equation Model* (PLS-SEM) (Ghozali dan Latan dalam Carla 2013). PLS-SEM sendiri menggunakan *SmartPLS*, *WarpPLS*, *PLS-Graph*, dan *VisualGraph*.

Carla (2013) mengemukakan bahwa perbedaan antara CB-SEM dan PLS-SEM yang paling dominan terlihat adalah CB-SEM mensyaratkan bahwa teori yang digunakan haruslah kuat dan data harus memiliki distribusi yang normal, sedangkan PLS-SEM tidak mementingkan teori yang kuat dan tidak mengharuskan data memiliki distribusi yang normal. Selain itu, Hanseler *et.al*, Pirouz, Sarstedt dan Tenenhaus (Ghozali dan Latan, 2012) juga mengungkapkan salah satu kelebihan PLS-SEM dibandingkan dengan CB-SEM adalah mampu mengatasi model yang kompleks dengan *multiple* variabel eksogen dan endogen dengan banyak indikator, dapat digunakan pada jumlah sampel kecil dan dapat mengatasi variabel dengan tipe nominal, ordinal, dan *continuous*.

Partial Least Square (PLS) adalah bagian dari model persamaan struktural (SEM). *Partial Least Square* (PLS) merupakan teknik terbaru yang banyak diminati, karena tidak membutuhkan data yang terdistribusi normal atau sebuah penelitian dengan sampel yang sedikit (Carla, 2013). Terdapat beberapa alasan yang mendasari digunakannya *Partial Least Square* (PLS) dalam suatu penelitian, yaitu:

- (1) Metode analisis data *Partial Least Square* (PLS) tidak harus menggunakan sampel yang jumlahnya besar.
- (2) *Partial Least Square* (PLS) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih lemah.
- (3) Pendekatan *Partial Least Square* (PLS) diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* dapat digunakan untuk menjelaskan.

Pemilihan metode *Partial Least Square* (PLS) didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini terdiri dari tujuh variabel laten yang dibentuk dengan indikator formatif. Model formatif mengasumsikan bahwa indikator-indikator mempengaruhi konstruk, dimana arah kausalitas dari indikator ke konstruk. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji hipotesis dalam analisis PLS-SEM adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Measurement model atau pengukuran model atau sering juga disebut *outer model* adalah pengujian yang dilakukan terhadap indikator yang membentuk variabel laten eksogen (Carla, 2013). Evaluasi *outer model* ini pada dasarnya untuk menguji validitas dari masing-masing indikator dengan konstruknya. Apabila

indikator tidak menunjukkan nilai yang valid maka indikator tersebut dihapuskan dari model penelitian. Konstruk reflektif dibutuhkan pengujian validitas dan reabilitas konstruk, sedangkan untuk konstruk formatif, pengukuran hanya dilakukan melihat signifikansi *weight*-nya saja. Adapun yang perlu dilakukan dalam model pengukuran dengan menggunakan konstruk formatif diantaranya (Chin dalam Ghozali dan Latan, 2012:82):

- 1) Memperoleh signifikansi *weight*, melalui prosedur resampling (*jackknifing* atau *bootstrapping*). Jika didapat nilai signifikansi *weight* dengan t-statistik >1.96 (signifikansi level 5%), maka dapat disimpulkan bahwa indikator konstruk adalah valid.
- 2) Melakukan uji multikolinieritas dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan lawannya *Tolerance*. Untuk nilai VIF direkomendasikan <10 atau <5 dan nilai *Tolerance* >0.10 atau >0.20 .

b. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Beberapa cara untuk menilai model yang telah dibuat oleh peneliti yaitu dengan melihat nilai *R-Square*. Ghozali dan Latan (2012) menyatakan bahwa *structural model* atau *inner model* atau disebut juga model struktural merupakan bagian pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji signifikansi variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen) dan nilai dari R^2 . Nilai *R-Square* 0.75, 0.50, dan 0.25 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah (Hair dalam Ghozali dan Latan, 2012:85). Selain itu dapat dilihat pula melalui *Q-Squares*, dimana jika *Q-Square* >0 , maka model memiliki *predictive*

relevance sedangkan sebaliknya jika <0 , maka model tidak memiliki *predictive relevance*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia. Hal ini berarti besar kecilnya suatu bank syariah akan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia. Hal ini diduga karena Dewan Komisaris sebagai wakil *shareholders* maka Dewan Komisaris membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas yang lebih menguntungkan daripada untuk aktivitas sosial.
3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada perbankan di Indonesia dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.
4. *Cross-directorship* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya, ketika Dewan Komisaris menjabat lebih dari satu perusahaan maka akan memperoleh informasi untuk mengevaluasi

manajemen dan informasi tentang perusahaan tersebut termasuk informasi pengungkapan ISR.

5. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Ini berarti kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dilakukan oleh perbankan syariah.
6. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan di Indonesia. Hal ini diduga kepemilikan institusional hanya memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan tanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Disarankan bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan/undang-undang khusus mengenai praktik pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia karena belum ada peraturan baku mengenai item-item pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Variabel eksogen dalam penelitian ini mungkin belum dapat mencerminkan suatu *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam suatu perbankan syariah, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel eksogen lain yang dapat mencerminkan dan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

3. Walaupun periode pengamatan dalam penelitian ini cukup panjang, yaitu empat tahun, tetapi disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan tahun pengamatan minimal lima tahun sehingga dapat lebih menggambarkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Ririn Dwi. 2011. "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dalam *Annual Report*." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Assegaf, Yasmin Umar, Falikhatun dan S. Wahyuni. 2012. "Bank Syariah di Indonesia: Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (*Islamic Social Responsibility Disclosure*)". *Conference in Business, Accounting and Management*. Vol. 1, No. 1 Desember 2013, pp. 255-267.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Carla, Yohana. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fee Audit Dari Segi Client ATTRIBUTE (Studi Pada Perusahaan Yang Listing di Bursa Efek Singapura pada tahun 2011-2012)". Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Chariri, Anis dan Charles Pramudita Ertanto. (2012). *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia)*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Halaman 1-15.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. 2015. *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Fahrizqi, Anggara. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Falichin, Muh Zulfa Minachul. 2011. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Reaksi Investor dengan Environmental Performance Rating dan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi". Skripsi. Universitas Diponegoro.

- Farook, Sayd, M. Khabir dan R. Lanis. 2011. "*Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks*". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 2, pp. 114-141.
- Fauziah, Khusnul dan Prabowo Yudho Jayanto. 2013. "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting* Indeks". *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol.5, No.1, Maret 2013, pp.12-20.
- Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. 2010. "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative* Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks". *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2012. "*Partial Least Square* Konsep Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3 Untuk Penelitian Empiris". Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ibrahim, Zuraeda, Andrew Marshall dan R. A. Rahman. 2013." *Islamic Social Disclosure of Malaysian Public Listed Companies: Empirical Findings*".
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.
- Khoirudin, Amirul. 2013. "Corporate Governance dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Lestari, Puji. 2013. "Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks: Case Of Indonesia". *International Journal of Business and Management Invention*. Vol. 2, Oktober 2013, pp. 28-34.
- Maulida, Aldheita Purnasanti, Agung Yulianto dan Asrori. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)". Dalam *Accounting Analysis Journal*.

- Mestuti, Arum Setyo. 2012. "Analisis Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan dengan Corporate Governance Seagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Ningrum, Ratna Aditya. 2013. "Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR". Dalam *Accounting Analysis Journal*.
- Nurkhin, Akhmad. 2009. "Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Magister Akuntansi*. Universitas Diponegoro.
- Nurrahman, Adimulya Dan Sudarno. 2013. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report". Dalam *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, Hal. 1-14. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-06/BL/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-03/BI/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Putri, Tria Karina. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Raditya, Amalia Nurul. 2012. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rizkiningsih, Priyesa. 2012. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR): Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan Negara-Negara Gulf Cooperation Council”. Skripsi. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: TARSITO.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.

Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2007. “Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar: Universitas Hasanudin.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Utami, Indah Dewi dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen*. Vol. 21, No. 3 Desember 2010. STIE YKPN.

Widiawati, Septi. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011”. Skripsi. Universitas Diponegoro.

<http://mughtareffendiharahap.blogspot.com/2014/02/teori-teori-tentang-csr-cooperate.html>

<http://syariah-economics.blogspot.com/2009/04/apakah-pengawasan-dps-diperlukan-atas.html>

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/struktur-kepemilikan-perusahaan.html>

www.bi.go.id

www.cic-fcgi.org

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR)

No	Item yang Diungkap
	INVESTASI DAN KEUANGAN
1	Aktivitas riba
2	Gharar
3	Zakat
4	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5	<i>Current value balance sheet</i>
6	<i>Value added statement</i>
	PRODUK DAN JASA
7	Status halal atau syariah dalam produk
8	Pengembangan produk
9	Peningkatan pelayanan
10	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku
	TENAGA KERJA
11	Karakteristik pekerjaan
12	Pendidikan dan pelatihan
13	Kesempatan yang sama
14	Kesehatan dan keselamatan kerja
15	Lingkungan kerja
16	Perekrutan khusus
	SOSIAL
17	Shadaqoh/donasi
18	Wakaf
19	Qard Hasan
20	Zakat/sumbangan dari karyawan atau nasabah
21	Pendidikan
22	Bantuan kesehatan
23	Pemberdayaan ekonomi
24	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
25	Pemangunan atau renovasi masjid
26	Kegiatan kepemudaan
27	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bbareng, dan lain-lain)
28	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain
	LINGKUNGAN
29	Kampanye <i>go green</i>
30	Konservasi lingkungan
31	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
32	Polusi
33	Perbaikan dan pembuatan sarana umum

34	Audit lingkungan
35	Kebijakan manajemen lingkungan
	TATA KELOLA ORGANISASI
36	Profil dan strategi organisasi
37	Struktur organisasi
38	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
39	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
40	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
41	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
42	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
43	Penanganan benturan kepentingan
44	Penerapan fungsi kepatuhan bank
45	Penerapan fungsi audit intern
46	Penerapan fungsi audit ekstern
47	Batas maksimum penyaluran dana
48	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
49	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
50	Etika perusahaan

Sumber: Fauziah 2013

Lampiran 2 Definisi Item Indeks Islamic Social Reporting (ISR)

No	Item ISR	Pengertian
1	Aktivitas Riba	Aktivitas bank yang tidak sesuai dengan ketentuan islam meliputi pendapatan non halal (pendapatan bunga dan beban bunga) dari bank konvensional.
2	Gharar	Aktivitas yang mengandung ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi.
3	Zakat	Besarnya harta yang dibayarkan oleh bank kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan islam.
4	Kebijakan mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent client</i>	Kebijakan bank dalam menangani pelanggan atau nasabah yang mengalami kebangkrutan.
5	<i>Current Value Balance Sheet</i>	Laporan posisi keuangan (neraca) bank tiap tahun
6	<i>Value Added Statement</i>	Pernyataan nilai tambah bank
7	Status halal atau syariah dalam produk	Penjelasan produk bank (produk pembiayaan dan pendanaan) yang ditawarkan.
8	Pengembangan produk	Usaha bank untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau nasabah dengan mengembangkan produknya.
9	Peningkatan pelayanan	Usaha dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan atau nasabah.
10	Keluhan pelanggan atau kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku	Pengaduan yang disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan akan pelayanan dan kejadian yang terjadi karena ketidaktaatan pelanggan seperti keterlambatan dalam membayar serta denda yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya tunggakan.
11	Karakteristik pekerjaan	Gambaran mengenai pekerjaan dalam bank tersebut seperti jumlah pekerja dan kebijakan untuk para karyawan.
12	Pendidikan dan pelatihan	Program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh bank untuk para karyawan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan jenjang karir karyawan.
13	Kesempatan yang sama	Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan reward, punishment, pelatihan, dan pengembangan karir.
14	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kebijakan yang dibuat oleh bank mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan saat bekerja.
15	Lingkungan kerja	Gambaran mengenai lingkungan tempat bekerja karyawan.
16	Perekrutan khusus	Program penerimaan karyawan dengan cara khusus, misalnya kerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan.

17	Shodaqoh atau donasi	Jumlah shodaqoh atau donasi yang digunakan untuk kegiatan sosial.
18	Wakaf	Jumlah wakaf yang digunakan untuk kegiatan sosial.
19	Qard Hasan	Dana kebajikan yang diperoleh dari denda, pendapatan non halal, dan shodaqoh yang digunakan untuk kegiatan sosial.
20	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah	Jumlah zakat yang berasal dari dalam bank (karyawan) maupun luar bank (nasabah).
21	Pendidikan	Kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank dalam bidang pendidikan, seperti pendirian sekolah, bantuan finansial maupun non finansial, serta pemberian beasiswa.
22	Bantuan kesehatan	Kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank dalam bidang kesehatan, seperti donor darah, pengobatan gratis, dll.
23	Pemberdayaan ekonomi	Kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank dalam bidang ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro.
24	Kepedulian terhadap anak yatim	Bantuan finansial maupun non finansial yang diberikan kepada anak yatim piatu.
25	Pembangunan atau renovasi masjid	Bantuan finansial maupun non finansial yang diberikan untuk pembangunan atau renovasi masjid.
26	Kegiatan kepemudaan	Bantuan atau sponsor yang diberikan untuk kegiatan kepemudaan.
27	Kegiatan sosial lainnya	Mwngadakan atau memberikan bantuan kegiatan sosial lainnya, seperti mengadakan buka bersama saat bulan ramadhan.
28	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dll	Memberikan bantuan untuk sebuah acara sosial.
29	Kampanye go green	Melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai konservasi lingkungan.
30	Konservasi lingkungan	Melakukan kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti penanaman pohon.
31	Perlindungan terhadap flora fauna liar yang terancam punah	Bank melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi flora fauna yang terancam punah.
32	Polusi	Melakukan kegiatan yang diupayakan untuk mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan bank.
33	Perbaikan dan pembuatan sarana umum	Melakukan kegiatan perbaikan serta pembuatan sarana umum.
34	Audit lingkungan	Memberikan penilaian untuk menjaga kelestarian lingkungan.
35	Kebijakan manajemen lingkungan	Kebijakan manajemen dalam menjaga kelestarian lingkungan.
36	Profil dan strategi organisasi	Profil singkat tentang bank dan strategi yang dilakukan untuk masa depan bank.
37	Struktur organisasi	Struktur organisasi dalam bank tersebut.

38	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
39	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
40	Kelengkapan dan pelaksanaan komite	Uraian mengenai kelengkapan dan pelaksanaan komite.
41	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.
42	Penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Uraian mengenai penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
43	Penanganan benturan kepentingan	Uraian mengenai penanganan benturan kepentingan.
44	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Uraian mengenai penerapan fungsi kepatuhan bank.
45	Penerapan fungsi audit internal	Uraian mengenai penerapan fungsi audit internal.
46	Penerapan fungsi audit eksternal	Uraian mengenai penerapan fungsi audit eksternal.
47	Batas maksimum penyaluran dana	Uraian mengenai batas maksimum penyaluran dana.
48	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Uraian mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
49	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya	Uraian mengenai kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya.
50	Etika perusahaan	Uraian mengenai kode etik perusahaan.

Lampiran 3 Daftar Populasi, Proses Perolehan Sampel, dan Daftar Sampel

Daftar Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Kode Bank	Nama Bank
1	BSB	Bank Syariah Bukopin
2	BMS	Bank Mega Syariah
3	BMI	Bank Muamalat Indonesia
4	BSM	Bank Syariah Mandiri
5	BCAS	Bank Central Asia Syariah
6	BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
7	BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
8	PBS	Panin Bank Syariah
9	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah
10	BMSI	Bank Maybank Syariah Indonesia
11	BVS	Bank Victoria Syariah
12	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Proses Perolehan Sampel

Jumlah bank umum syariah yang terdapat di Indonesia	12
Bank umum syariah yang tidak memenuhi kriteria	(4)
Total Bank	8
Total unit analisis (total bank x empat tahun)	32

Daftar Sampel

No	Kode Bank	Nama Bank
1	BSB	Bank Syariah Bukopin
2	BMS	Bank Mega Syariah
3	BMI	Bank Muamalat Indonesia
4	BSM	Bank Syariah Mandiri
5	BCAS	Bank Central Asia Syariah
6	BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
7	BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
8	PBS	Panin Bank Syariah

Lampiran 4 Nilai *Content Analysis* BUS di Indonesia Berdasarkan Tema ISR

	Tema	2010	2011	2012	2013
A	Investasi dan Keuangan	21	23	22	22
B	Produk dan Jasa	21	25	28	28
C	Tenaga Kerja	22	26	26	28
D	Sosial	36	49	58	66
E	Lingkungan	4	5	8	10
F	Tata Kelola Organisasi	106	113	114	115
	Total	210	241	256	269

Lampiran 5 Nilai *Islamic Social Reporting (ISR)* pada BUS di Indonesia

No.	Nama Bank	Hasil Checklist				Rasio ISR			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Bank Syariah Bukopin	20	29	29	31	0.40	0.58	0.58	0.62
2	Bank Mega Syariah	26	26	25	28	0.52	0.52	0.50	0.56
3	Bank Muamalat Indonesia	33	41	40	35	0.66	0.82	0.80	0.70
4	Bank Syariah Mandiri	36	40	38	41	0.72	0.80	0.76	0.82
5	BCA Syariah	25	26	29	29	0.50	0.50	0.58	0.58
6	BNI Syariah	29	32	37	39	0.58	0.64	0.74	0.78
7	BRI Syariah	26	27	33	35	0.52	0.54	0.66	0.70
8	Panin Bank Syariah	18	21	25	31	0.36	0.42	0.50	0.62
Total		210	241	256	269				
Rata-rata		26.25	30.13	32	33.63				

Lampiran 6 Daftar Nilai Ukuran Perusahaan

No.	Nama Bank	Tahun	Ukuran Perusahaan
1	Bank Syariah Bukopin	2010	28.417
1	Bank Syariah Bukopin	2011	28.635
1	Bank Syariah Bukopin	2012	28.916
1	Bank Syariah Bukopin	2013	29.100
2	Bank Mega Syariah	2010	29.165
2	Bank Mega Syariah	2011	29.348
2	Bank Mega Syariah	2012	29.731
2	Bank Mega Syariah	2013	29.842
3	Bank Muamalat Indonesia	2010	30.694
3	Bank Muamalat Indonesia	2011	31.112
3	Bank Muamalat Indonesia	2012	31.434
3	Bank Muamalat Indonesia	2013	31.633
4	Bank Syariah Mandiri	2010	31.112
4	Bank Syariah Mandiri	2011	31.516
4	Bank Syariah Mandiri	2012	31.624
4	Bank Syariah Mandiri	2013	31.789
5	BCA Syariah	2010	27.497
5	BCA Syariah	2011	27.827
5	BCA Syariah	2012	28.102
5	BCA Syariah	2013	28.345
6	BNI Syariah	2010	29.487
6	BNI Syariah	2011	29.767
6	BNI Syariah	2012	29.996
6	BNI Syariah	2013	30.319
7	BRI Syariah	2010	29.557
7	BRI Syariah	2011	30.047
7	BRI Syariah	2012	30.276
7	BRI Syariah	2013	30.488
8	Panin Bank Syariah	2010	26.852
8	Panin Bank Syariah	2011	27.650
8	Panin Bank Syariah	2012	28.392
8	Panin Bank Syariah	2013	29.030

Lampiran 7 Daftar Nilai Ukuran Dewan Komisaris

No.	Nama Bank	Tahun	Ukuran Dewan Komisaris
1	Bank Syariah Bukopin	2010	3
1	Bank Syariah Bukopin	2011	3
1	Bank Syariah Bukopin	2012	3
1	Bank Syariah Bukopin	2013	3
2	Bank Mega Syariah	2010	3
2	Bank Mega Syariah	2011	3
2	Bank Mega Syariah	2012	3
2	Bank Mega Syariah	2013	3
3	Bank Muamalat Indonesia	2010	6
3	Bank Muamalat Indonesia	2011	6
3	Bank Muamalat Indonesia	2012	6
3	Bank Muamalat Indonesia	2013	6
4	Bank Syariah Mandiri	2010	5
4	Bank Syariah Mandiri	2011	5
4	Bank Syariah Mandiri	2012	5
4	Bank Syariah Mandiri	2013	5
5	BCA Syariah	2010	3
5	BCA Syariah	2011	3
5	BCA Syariah	2012	3
5	BCA Syariah	2013	3
6	BNI Syariah	2010	3
6	BNI Syariah	2011	3
6	BNI Syariah	2012	3
6	BNI Syariah	2013	3
7	BRI Syariah	2010	4
7	BRI Syariah	2011	4
7	BRI Syariah	2012	5
7	BRI Syariah	2013	5
8	Panin Bank Syariah	2010	3
8	Panin Bank Syariah	2011	3
8	Panin Bank Syariah	2012	3
8	Panin Bank Syariah	2013	3

Lampiran 8 Daftar Nilai Ukuran Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Bank	Tahun	Ukuran Dewan Pengawas Syariah
1	Bank Syariah Bukopin	2010	3
1	Bank Syariah Bukopin	2011	2
1	Bank Syariah Bukopin	2012	2
1	Bank Syariah Bukopin	2013	2
2	Bank Mega Syariah	2010	3
2	Bank Mega Syariah	2011	3
2	Bank Mega Syariah	2012	3
2	Bank Mega Syariah	2013	3
3	Bank Muamalat Indonesia	2010	3
3	Bank Muamalat Indonesia	2011	3
3	Bank Muamalat Indonesia	2012	3
3	Bank Muamalat Indonesia	2013	3
4	Bank Syariah Mandiri	2010	3
4	Bank Syariah Mandiri	2011	3
4	Bank Syariah Mandiri	2012	3
4	Bank Syariah Mandiri	2013	3
5	BCA Syariah	2010	2
5	BCA Syariah	2011	2
5	BCA Syariah	2012	2
5	BCA Syariah	2013	2
6	BNI Syariah	2010	2
6	BNI Syariah	2011	2
6	BNI Syariah	2012	2
6	BNI Syariah	2013	2
7	BRI Syariah	2010	3
7	BRI Syariah	2011	2
7	BRI Syariah	2012	2
7	BRI Syariah	2013	2
8	Panin Bank Syariah	2010	2
8	Panin Bank Syariah	2011	2
8	Panin Bank Syariah	2012	2
8	Panin Bank Syariah	2013	2

Lampiran 9 Daftar Nilai *Cross-directorship*

No.	Nama Bank	Tahun	<i>Cross-directorship</i>
1	Bank Syariah Bukopin	2010	0.000
1	Bank Syariah Bukopin	2011	1.000
1	Bank Syariah Bukopin	2012	1.000
1	Bank Syariah Bukopin	2013	1.000
2	Bank Mega Syariah	2010	0.000
2	Bank Mega Syariah	2011	0.330
2	Bank Mega Syariah	2012	0.330
2	Bank Mega Syariah	2013	0.330
3	Bank Muamalat Indonesia	2010	0.670
3	Bank Muamalat Indonesia	2011	0.830
3	Bank Muamalat Indonesia	2012	0.830
3	Bank Muamalat Indonesia	2013	0.830
4	Bank Syariah Mandiri	2010	0.000
4	Bank Syariah Mandiri	2011	0.000
4	Bank Syariah Mandiri	2012	0.000
4	Bank Syariah Mandiri	2013	0.000
5	BCA Syariah	2010	0.330
5	BCA Syariah	2011	0.000
5	BCA Syariah	2012	0.000
5	BCA Syariah	2013	0.000
6	BNI Syariah	2010	0.330
6	BNI Syariah	2011	0.000
6	BNI Syariah	2012	0.000
6	BNI Syariah	2013	0.670
7	BRI Syariah	2010	0.000
7	BRI Syariah	2011	0.500
7	BRI Syariah	2012	0.800
7	BRI Syariah	2013	0.600
8	Panin Bank Syariah	2010	0.000
8	Panin Bank Syariah	2011	0.330
8	Panin Bank Syariah	2012	0.330
8	Panin Bank Syariah	2013	0.000

Lampiran 10 Daftar Nilai Kepemilikan Manajerial

No.	Nama Bank	Tahun	Kepemilikan Manajerial
1	Bank Syariah Bukopin	2010	0.025
1	Bank Syariah Bukopin	2011	0.016
1	Bank Syariah Bukopin	2012	0.016
1	Bank Syariah Bukopin	2013	0.016
2	Bank Mega Syariah	2010	0.000
2	Bank Mega Syariah	2011	0.000
2	Bank Mega Syariah	2012	0.000
2	Bank Mega Syariah	2013	0.000
3	Bank Muamalat Indonesia	2010	0.140
3	Bank Muamalat Indonesia	2011	0.140
3	Bank Muamalat Indonesia	2012	0.140
3	Bank Muamalat Indonesia	2013	0.140
4	Bank Syariah Mandiri	2010	0.000
4	Bank Syariah Mandiri	2011	0.000
4	Bank Syariah Mandiri	2012	0.000
4	Bank Syariah Mandiri	2013	0.000
5	BCA Syariah	2010	0.000
5	BCA Syariah	2011	0.000
5	BCA Syariah	2012	0.000
5	BCA Syariah	2013	0.000
6	BNI Syariah	2010	-
6	BNI Syariah	2011	-
6	BNI Syariah	2012	-
6	BNI Syariah	2013	-
7	BRI Syariah	2010	0.000
7	BRI Syariah	2011	0.000
7	BRI Syariah	2012	0.000
7	BRI Syariah	2013	0.000
8	Panin Bank Syariah	2010	0.000
8	Panin Bank Syariah	2011	0.000
8	Panin Bank Syariah	2012	0.000
8	Panin Bank Syariah	2013	0.000

Lampiran 11 Daftar Nilai Kepemilikan Institusional

No.	Nama Bank	Tahun	Kepemilikan Institusional
1	Bank Syariah Bukopin	2010	0.419
1	Bank Syariah Bukopin	2011	0.974
1	Bank Syariah Bukopin	2012	0.974
1	Bank Syariah Bukopin	2013	0.974
2	Bank Mega Syariah	2010	1.000
2	Bank Mega Syariah	2011	1.000
2	Bank Mega Syariah	2012	1.000
2	Bank Mega Syariah	2013	1.000
3	Bank Muamalat Indonesia	2010	0.860
3	Bank Muamalat Indonesia	2011	0.860
3	Bank Muamalat Indonesia	2012	0.667
3	Bank Muamalat Indonesia	2013	0.860
4	Bank Syariah Mandiri	2010	1.000
4	Bank Syariah Mandiri	2011	1.000
4	Bank Syariah Mandiri	2012	1.000
4	Bank Syariah Mandiri	2013	1.000
5	BCA Syariah	2010	1.000
5	BCA Syariah	2011	1.000
5	BCA Syariah	2012	1.000
5	BCA Syariah	2013	1.000
6	BNI Syariah	2010	1.000
6	BNI Syariah	2011	1.000
6	BNI Syariah	2012	1.000
6	BNI Syariah	2013	1.000
7	BRI Syariah	2010	1.000
7	BRI Syariah	2011	1.000
7	BRI Syariah	2012	1.000
7	BRI Syariah	2013	0.662
8	Panin Bank Syariah	2010	1.000
8	Panin Bank Syariah	2011	1.000
8	Panin Bank Syariah	2012	1.000
8	Panin Bank Syariah	2013	1.000

Lampiran 12 Rangkuman Nilai Variabel Penelitian

No	Kode Bank	Tahun	UP	UDK	UDPS	Crossdir	MOWN	INOWN	ISR
1	BSB	2010	28.417	3	3	0	0.025	0.419	0.40
1	BSB	2011	28.635	3	2	1	0.016	0.974	0.58
1	BSB	2012	28.916	3	2	1	0.016	0.974	0.58
1	BSB	2013	29.100	3	2	1	0.016	0.974	0.62
2	BMS	2010	29.165	3	3	0	0.000	1.000	0.52
2	BMS	2011	29.348	3	3	0.33	0.000	1.000	0.52
2	BMS	2012	29.731	3	3	0.33	0.000	1.000	0.50
2	BMS	2013	29.842	3	3	0.33	0.000	1.000	0.56
3	BMI	2010	30.694	6	3	0.67	0.140	0.860	0.66
3	BMI	2011	31.112	6	3	0.83	0.140	0.860	0.82
3	BMI	2012	31.434	6	3	0.83	0.140	0.667	0.80
3	BMI	2013	31.633	6	3	0.83	0.140	0.860	0.70
4	BSM	2010	31.112	5	3	0	0.000	1.000	0.72
4	BSM	2011	31.516	5	3	0	0.000	1.000	0.80
4	BSM	2012	31.624	5	3	0	0.000	1.000	0.76
4	BSM	2013	31.789	5	3	0	0.000	1.000	0.82
5	BCAS	2010	27.497	3	2	0.33	0.000	1.000	0.50
5	BCAS	2011	27.827	3	2	0	0.000	1.000	0.50
5	BCAS	2012	28.102	3	2	0	0.000	1.000	0.58
5	BCAS	2013	28.345	3	2	0	0.000	1.000	0.58
6	BNIS	2010	29.487	3	2	0.33	-	1.000	0.58
6	BNIS	2011	29.767	3	2	0	-	1.000	0.64
6	BNIS	2012	29.996	3	2	0	-	1.000	0.74
6	BNIS	2013	30.319	3	2	0.67	-	1.000	0.78
7	BRIS	2010	29.557	4	3	0	0.000	1.000	0.52
7	BRIS	2011	30.047	4	2	0.50	0.000	1.000	0.54
7	BRIS	2012	30.276	5	2	0.80	0.000	1.000	0.66
7	BRIS	2013	30.488	5	2	0.60	0.000	0.662	0.70
8	PBS	2010	26.852	3	2	0	0.000	1.000	0.36
8	PBS	2011	27.650	3	2	0.33	0.000	1.000	0.42
8	PBS	2012	28.392	3	2	0.33	0.000	1.000	0.50
8	PBS	2013	29.030	3	2	0	0.000	1.000	0.62

Lampiran 13 Tabel yang digunakan dalam Analisis Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	Nilai Rata-Rata	Simpangan Baku	Minimum	Maximum
ISR	0.61	0.125235	0.36	0.82
UP	29.616	1.342638	26.852	31.789
UDK	3.8125	1.148281	3	6
UDPS	2.4375	0.504016	2	3
CROSSDIR	0.345	0.366676	0	1
MOWN	0.020	0.046596	0	0.140
INOWN	0.945	0.130495	0.419	1.000

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
IISR -> ISR	1.000000	1.000000	0.000000		
RCROSSDIR -> CROSSDIR	1.000000	1.000000	0.000000		
RDK -> UDK	1.000000	1.000000	0.000000		
RDPS -> UDPS	1.000000	1.000000	0.000000		
RINOWN -> INOWN	1.000000	1.000000	0.000000		
RMOWN -> MOWN	1.000000	1.000000	0.000000		
TA -> UP	1.000000	1.000000	0.000000		

Lampiran 13 (Lanjutan)

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
CROSSDIR -> ISR	-0.288149	-0.282221	0.048837	0.048837	5.900251
INOWN -> ISR	0.033436	0.022278	0.044534	0.044534	0.750792
MOWN -> ISR	0.326946	0.312042	0.097479	0.097479	3.354001
UDK -> ISR	-0.142046	-0.130335	0.084416	0.084416	1.682695
UDPS -> ISR	-0.549898	-0.564159	0.071848	0.071848	7.653681
UP -> ISR	1.214580	1.204779	0.083070	0.083070	14.621131

Nilai R-Square

	R Square
CROSSDIR	
INOWN	
ISR	0.841092
MOWN	
UDK	
UDPS	
UP	

Hasil Keputusan Hipotesis

No.	Keterangan	H	Original Sampel	T-Statistik	Keputusan
1	UP -> ISR	H1	1.214580	16.000172	Diterima
2	UDK -> ISR	H2	-0.142046	1.482368	Ditolak
3	UDPS -> ISR	H3	-0.549898	8.055032	Diterima
4	CROSSDIR -> ISR	H4	-0.288149	5.433409	Diterima
5	MOWN -> ISR	H5	0.326946	3.312531	Diterima
6	INOWN -> ISR	H6	0.033436	1.279380	Ditolak

Lampiran 14 (Lanjutan 1)

F																
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	20	29	29	31	26	26	25	28	33	41	40	35	36	40	38	41

Lampiran 14 (Lanjutan 3)

F																
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
50	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	25	26	29	29	29	32	37	39	26	27	33	35	18	21	25	31

Lampiran 15 Rujukan Halaman *Checklist* Indeks ISR Tahun 2010

Item	BSB	BMS	BMI	BSM	BCAS	BNIS	BRIS	PBS
A								
1	42LK	12LK		223	52	110	12LK	29LK
2								
3		11LK	93LK	178	86	10LK	11LK	
4								
5	1LK	1LK	3LK	166	77	1LK	1LK	2LK
6								
B								
7	95	67	52	26	157	122	51	36
8	53		106	72	21	61	67	
9		5	106	139			67	
10		12LK	199	139/ 245	87	108	12LK	
C								
11		46/43	198/97	135/99/ 134	32	72/112/ 69	91	34
12	73/77	43	71	136	31/32	70		33
13		46	71	136		71		
14				139				
15							92	
16								
D								
17	92		93LK			11LK	12LK	
18			230					
19		12LK		140	87	11LK	12LK	
20		11LK		178	86		11LK	
21			220/ 234	140				
22	92	49	226	140				
23			215	140		117		
24	92	48	233	140	57	117		
25			233	140				
26								
27	92		233	140	58	117		
28	93			140				
E								
29			228					
30			228	141				
31								
32								
33			224					

Lampiran 15 (Lanjutan 2)

34								
35								
F								
36	6	6	40	22	2	22	1	4
37	22	60	54	34	143	28	15	35
38	57	28	139	93	54	78	71	24
39	62	29	151	96	54	81	78	25
40	60	30	158	99	54	84	74	25
41	59	Gcg	146	104	54	97	83	26
42		Gcg	178	Gcg	55	100	83	28
43	64	Gcg	195	107	55	101	83	28
44	65	Gcg	187	129	55	103	80	27
45	64	Gcg	180	114	55	104	85	28
46	67	Gcg	185	Gcg	55	106	86	28
47		Gcg	194	Gcg	55	107	83	28
48	68	Gcg	196	Gcg	55	108	83	28
49	66			132	55	103	81	
50			210	109		29		

Lampiran 16 (Lanjutan 2)

33			276	192				
34								
35								
F								
36	2	8	24	32	24	36	73	2
37	5	64	442	33	143	42	11	46
38	60	29	160	118	42	87	53	37
39	67	30	176	118	42	92	56	37
40	64	31	185	118	42	96	54	38
41	61	32	310	118	42	116	59	40
42	Gcg	Gcg	237	118	42	131	59	43
43	72	33	217	118	42	132	59	43
44	Gcg	33	214	118	42	133	57	43
45	69	34	220	118	42	119	60	43
46	Gcg	34	229	118	42	124	60	43
47	Gcg	34	237	118	42	139	59	44
48	Gcg	35	233	118	42	140	59	44
49		46	218	213			64	44
50			247	170		43		

Lampiran 17 (Lanjutan 2)

32								
33			293	246		186	78	
34								
35								
F								
36	3	8	22	18	29	10	3	2
37	5	68	500	22	150	26	9	55
38	105	31	172	145	49	101	60	44
39	118	32	196	145	51	116	54	46
40	123	32	175	145	53	107	58	47
41	113	34	184	145	58	158	62	53
42	Gcg	Gcg	186	146	46	Gcg	Gcg	53
43	139	35	266	146	65	Gcg	Gcg	53
44	Gcg	35	210	146	60	132	65	53
45	135	35	215	146	61	128	67	53
46	Gcg	36	267	146	62	Gcg	68	53
47	Gcg	36	267	146	63	137	Gcg	53
48	138	37	268	146	64	138	Gcg	53
49	148	53	214	278	35		24	53
50	142		25	212		151		

Lampiran 18 (Lanjutan 2)

33			361	285		223	116	
34								
35								
F								
36	2	8	20	34	22	32	1	14
37	3	72	580	44	70	50	129	21
38	87	31	212	182	41	139	74	69
39	96	33	249	182	42	157	81	77
40	101	34	216	182	44	147	75	73
41	92	35	235	182	48	131	85	86
42	Gcg	Gcg	238	182	39	Gcg	Gcg	89
43	115	37	174	182	54	Gcg	Gcg	93
44	113	37	268	183	50	185	88	94
45	112	37	273	183	51	179	86	91
46	Gcg	38	292	183	51	Gcg	88	93
47	Gcg	38	352	183	52	191	Gcg	96
48	114	39	352	183	53	192	Gcg	96
49	121	52	272	271	50	197	90	100
50			311	260		208		